

# SINERGI

BULETIN BPIW

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

KEMENTERIAN PUPR  
BADAN PENGEMBANGAN  
INFRASTRUKTUR WILAYAH



[www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)



9 772461 110000

Edisi 14/Februari 2017

## BPIW Memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur  
Mengadopsi Arah Kebijakan dan  
Prioritas Nasional

Dukungan Infrastruktur PUPR untuk  
Pengembangan KSPN Borobudur



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR  
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR**

# **INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI**



**Gedung BPIW Lantai 1**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)

Telp. +6221-2751 5804



[www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)



[@informasiBPIW](https://twitter.com/informasiBPIW)



[@informasiBPIW](https://www.instagram.com/informasiBPIW)



[Layanan Informasi BPIW](#)



[BPIWkementerianPUPR](#)

# SINERGI

BULETIN BPIW

**Pelindung:**

Rido Matari Ichwan

**Penasehat:**

Dadang Rukmana

**Pengarah:**

Bobby Prabowo  
Harris H. Batubara  
Hadi Sucahyono  
Agusta Ersada Sinulingga

**Pemimpin Redaksi:**

P. Yudiantoro

**Redaktur Pelaksana:**

Shovich

**Redaksi:**

M. Salahudin Rasyidi  
Mochammad Tranggono  
Hari Suharto Diyaksa  
Erwin Adhi Setyadi  
Wahyu Hendrastomo  
Melva Eryani Marpaung

**Editor :**

Hendra Djamal

**Kontributor:**

Mutri Batul Aini  
Ichlasul Naufal  
Indira Dwi Kusumatuti  
Daris Anugrah

---

**Diterbitkan oleh:**

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  
(BPIW) Kementerian PUPR

---

**Alamat Redaksi:**

Gedung G, BPIW Lantai 1  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 11210  
Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)  
[humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id)  
Website: [www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)  
Twitter: @informasiBPIW  
Youtube: Layanan Informasi BPIW  
Facebook: BPIWkementerianPUPR  
No. Telp. +6221-2751 5804

---

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:  
[humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)

---

Design : Heri Hito

SALAM REDAKSI

.....

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan Februari ini, kami akan memfokuskan soal program yang akan dilakukan BPIW sepanjang 2017. Hal ini dijelaskan secara rinci pada rubrik Kabar Utama. Sedangkan laporan utama membahas mengenai dukungan infrastruktur PUPR pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Untuk rubrik wawancara menghadirkan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Ir. Harris Hasudungan Batubara, M.Eng.Sc. Dalam rubrik opini diisi Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Melva Eryani Marpaung, ST, MUM. Pada opini tersebut dibahas mengenai Infrastruktur Berkelanjutan di Kawasan Perkotaan.

Edisi Februari ini juga disajikan rubrik baru yakni "BPIW Menjawab", dimana BPIW menjawab pertanyaan seputar BPIW dan perencanaan infrastruktur PUPR dari para pembaca melalui media sosial dan yang dikirimkan melalui email BPIW.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan Februari melalui rubrik Kilas BPIW. Tidak hanya itu, sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan obyek wisata sejarah di Kota Bandung dan rubrik Obras atau Obrolan Santai bersama Bang Egi. Dalam rubrik Tips dibahas mengenai menjaga kesehatan tubuh saat melakukan kerja lembur. Kami berharap apa yang disajikan dapat memberi manfaat yang positif bagi para pembaca.

Selamat membaca.



05



**01 SALAM REDAKSI**

**02 DAFTAR ISI**

**03 PERSPEKTIF**

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Mengadopsi Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional

**04 KABAR UTAMA**

BPIW Memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional

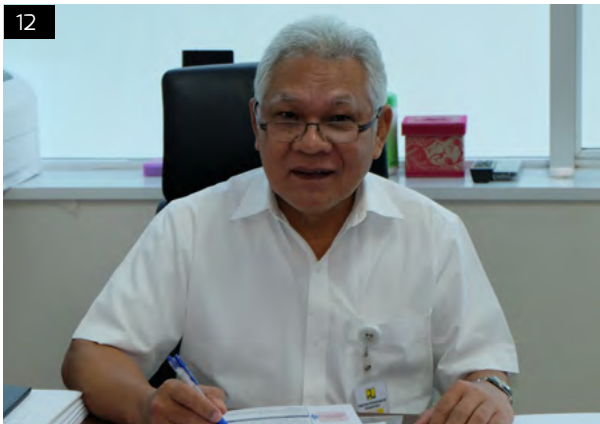
**10 REVIEW**

Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Permukiman

**11 GLOSSARY**

Istilah Seputar Urban

12



**12 WAWANCARA**

Ir. Harris Hasudungan Batubara, M.Eng.Sc: Pra Konreg Hasilkan Kegiatan Prioritas yang Terpadu dan Sinkron

21



32



**18 TEROPONG MEDIA**

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

**20 KILAS BPIW**

BPIW Dukung Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Jawa Bagian Selatan

**32 LAPORAN KHUSUS**

Dukungan Infrastruktur PUPR untuk Pengembangan KSPN Borobudur

**36 OPINI**

Infrastruktur Berkelanjutan di Kawasan Perkotaan

**42 INFOGRAFIS**

MP & DP Pengembangan Kawasan Perkotaan

**44 JALAN-JALAN**

Wisata Sejarah Di Bumi Paris Van Java

**46 WPS CORNER**

Wilayah Pengembangan Strategis 19 & 20

**48 TEKNOLOGI**

RISHA, Teknologi Bangunan Rumah Seperti LEGO

**50 POTRET**

Hari Sampah Nasional

**53 TIPS**

Tips Menjaga Kesehatan Tubuh Saat Sering Lembur Bekerja

**54 TOKOH**

A. Hermanto Dardak:

Fokus Beri Perhatian pada Perkotaan

54



# Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Mengadopsi Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional

Dokumen perencanaan yang merupakan produk dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR senantiasa memperhatikan arah kebijakan dan prioritas nasional seperti direktif Presiden, direktif Menteri, serta dokumen-dokumen perencanaan nasional. Pada tahun 2017, program dan kegiatan BPIW tidak lagi berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow program* prioritas dengan mengadopsi arah kebijakan nasional dan prioritas nasional. BPIW juga memadukan program-program infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah serta mensinkronkan program antar infrastruktur.

Ada beberapa prinsip pengembangan wilayah yang menjadi acuan, mulai dari mendorong pertumbuhan wilayah yang kompetitif baik secara nasional maupun global, memacu peningkatan produksi kawasan dan peningkatan nilai tambah hasil produksi. Selain itu, prinsip pengembangan wilayah berupa *cluster base* atau fokus pada klaster potensial dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menarik perkembangan kawasan di sekitarnya. Dengan demikian, hasil pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

BPIW juga mendorong program-program infrastruktur PUPR mengacu dan mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Untuk mendukung tema dari rencana kerja pemerintah pusat, maka program-program pembangunan infrastruktur PUPR, harus mampu menjaga

pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018. Langkah-langkah yang harus diterapkan antara lain, memperbaiki kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing, dan nilai tambah industri. Kemudian mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur.

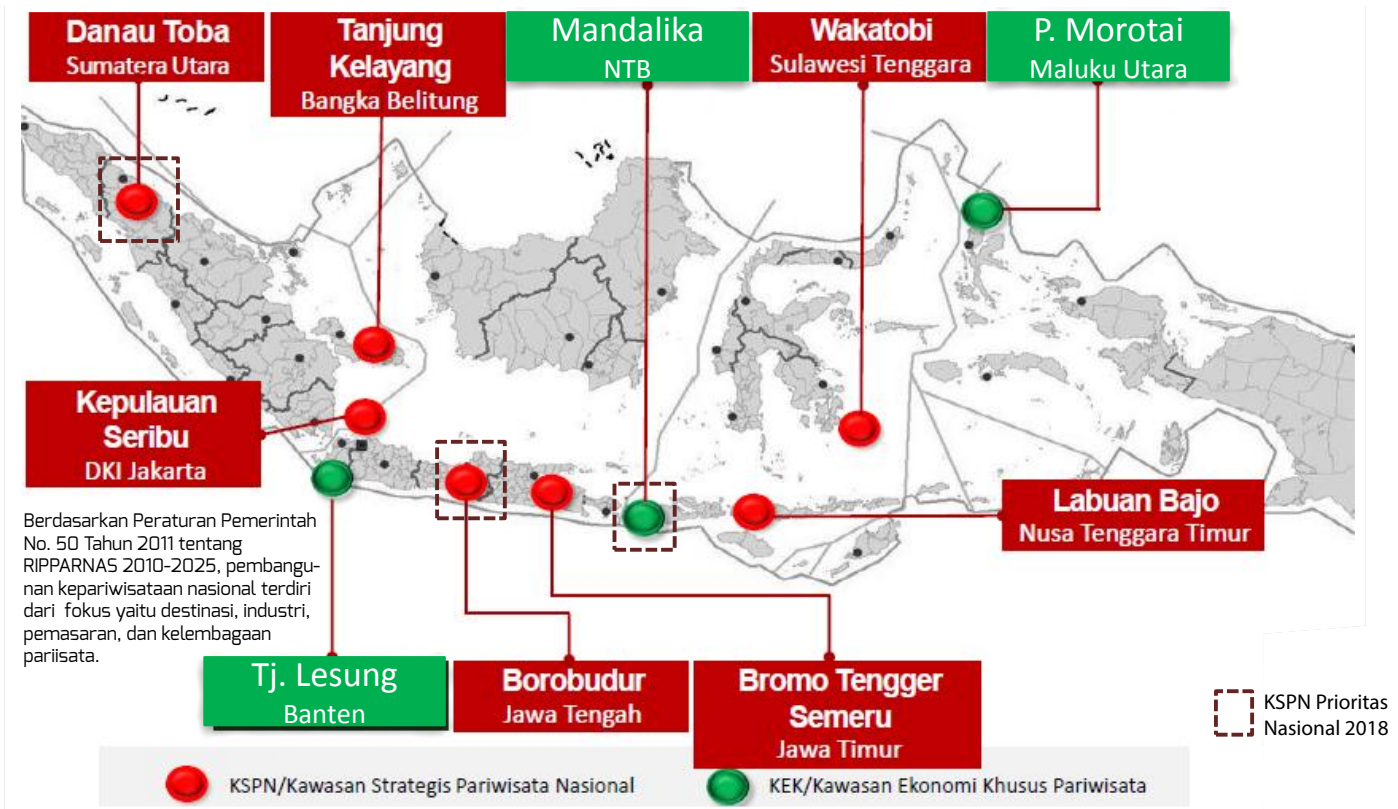
Salah satu arah kebijakan dan prioritas nasional adalah percepatan pengembangan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur di Jawa Tengah. KSPN Borobudur merupakan 1 dari 3 KSPN prioritas yang mendapat dukungan pembiayaan dari APBN dan pinjaman Bank Dunia. Selain Borobudur, dua KSPN yang juga menjadi prioritas nasional adalah Danau Toba di Sumatera Utara dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat ini BPIW sedang membuat *Integrated Masterplan* ketiga KSPN tersebut. Khusus KSPN Borobudur, pengembangannya dilakukan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga diharapkan KSPN Borobudur dapat memberi sumbangsih signifikan dalam tercapainya target nasional kunjungan turis asing yakni sebanyak 20 juta orang di tahun 2019. (\*\*)



# BPIW Memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional

Pada umumnya, produk yang dihasilkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berupa masterplan dan development plan. Produk yang dihasilkan tersebut harus memperhatikan arah kebijakan dan prioritas nasional seperti direktif presiden, direktif menteri, serta dokumen-dokumen perencanaan nasional. Program tahun 2017 ini juga harus dihasilkan dari proses perencanaan yang berbasis pengembangan wilayah.

## Pembangunan Pariwisata







Tol Trans Sumatera, Pembangunan Infrastruktur PUPR yang terpadu.

Sumber: Dok. PUPR

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan hal ini perlu ditekankan, karena pelaksanaan program dan kegiatan tidak lagi berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow program prioritas*. Penyusunan program dan anggaran yang memperhatikan arah kebijakan nasional dan prioritas nasional ini dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

Dikatakannya, sebagai lembaga yang lahir dari hasil reformasi birokrasi dalam hal inovasi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR, BPIW memadukan program-program infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah/kawasan serta mensinkronkan program antar infrastruktur.

Ada beberapa prinsip pengembangan wilayah yang menjadi acuan semua *stakeholder* terkait, seperti mendorong pertumbuhan wilayah yang kompetitif baik secara nasional maupun global, dengan memacu peningkatan produksi kawasan

dan peningkatan nilai tambah hasil produksi. Selain itu, prinsip pengembangan wilayah berupa *cluster base* atau memfokuskan pada klaster potensial dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menarik perkembangan kawasan di sekitarnya.

Lebih lanjut Rido mengatakan program-program infrastruktur PUPR, harus mengacu dan mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.

Untuk mendukung tema dari rencana kerja pemerintah pusat, maka program-program pembangunan infrastruktur PUPR, harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018. Langkah-langkah yang harus diterapkan, antara lain memperbaiki kualitas belanja, peningkatan

Lebih lanjut Rido mengatakan program-program infrastruktur PUPR, harus mengacu dan mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.

“Penajaman dilakukan dengan strategi perencanaan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. Kita jalankan penajaman berdasarkan *standard operating procedure* atau SOP yang ada,” tutur Rido.

iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing, dan nilai tambah industri. Kemudian mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur.

“Kita harus melakukan percepatan penetapan dokumen *review* Renstra PUPR dan ditargetkan bulan Maret 2017 sudah dapat diselesaikan. Kita juga harus memantapkan skema pelaksanaan Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg dan Konsultasi Regional atau Konreg PUPR, agar menjadi aturan baku dalam sistem pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. Skema pembiayaan juga harus segera dimantapkan,” tegas Rido.

Penajaman program-program pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah, mulai dari penajaman metodologi penyusunan rencana sampai dengan penyusunan program, juga menjadi perhatian Rido. Tujuannya jelas, agar program-program yang dibuat BPIW memiliki akuntabilitas yang tinggi.

“Penajaman dilakukan dengan strategi perencanaan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. Kita jalankan penajaman berdasarkan

*standard operating procedure* atau SOP yang ada,” tutur Rido.

Tidak hanya itu, Rido juga menekankan penyelesaian percontohan inkubasi, baik inkubasi pembangunan perkotaan, pembangunan kawasan, maupun pembangunan tempat istirahat bagi pengguna jalan di jalan nasional yang biasa disebut anjungan cerdas.

“Pada inkubasi tersebut, yang menjadi fokus kita adalah inkubasi pariwisata, terutama terhadap 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu kita buat perencanaan, sehingga nantinya langsung dapat dipergunakan unit organisasi atau unor maupun kementerian atau lembaga lainnya,” ucap Rido lagi. Ketiga KSPN tersebut akan dibuatkan *Integrated Tourism Masterplan* dengan menggunakan *loan* dari World Bank.

Perhatian khusus Kementerian PUPR, tidak hanya pada 3 KSPN saja, tapi juga program-program prioritas nasional lainnya untuk menghasilkan

## Fokus Pembangunan dan Prioritas Nasional 2018

### TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 :

“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”

Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018

- Memperbaiki Kualitas Belanja.
- Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif
- Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri
- Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui penyusunan program/kegiatan prioritas K/L

Pendekatan Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif Dan Spasial

Money Follow Program

10 PRIORITAS NASIONAL

<b>Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Vokasi</li> <li>• Peningkatan kualitas guru</li> </ul>	<b>Kesehatan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>• Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</li> <li>• Preventif dan Promotif</li> </ul>	<b>Perumahan dan Pemukiman</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Perumahan Layak</li> <li>• Air Bersih dan Sanitasi</li> </ul>	<b>Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)</li> <li>• Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)</li> </ul>	<b>Ketahanan Energi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EBT dan Konservasi Energi</li> <li>• Pemenuhan Kebutuhan Energi</li> </ul>	<b>Ketahanan Pangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Produksi pangan</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana pertanian</li> </ul>	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran</li> <li>• Pemenuhan Kebutuhan Dasar</li> <li>• Peningkatan</li> </ul>	<b>Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)</li> </ul>	<b>Pembangunan wilayah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal</li> <li>• Pembangunan Perdesaan</li> <li>• Reforma Agraria</li> <li>• Pencegahan dan</li> </ul>	<b>Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Pertahanan</li> <li>• Stabilitas Politik dan Keamanan</li> <li>• Kepastian Hukum</li> </ul>
--	---	--	---	---	---	---	---	---	---





Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Kalimantan Barat.

Sumber: Dok. PUPR

outcome dan manfaat yang optimal, seperti penyelesaian Perencanaan Kawasan Pantai Utara Jakarta atau *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD).

“Tidak kalah pentingnya juga bagaimana mensosialisasikan hasil dan metode pengukuran keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR, baik di internal dan eksternal BPIW. Selanjutnya, kita juga harus merumuskan kembali dan memodifikasi pelaksanaan inkubasi,” imbuhnya.

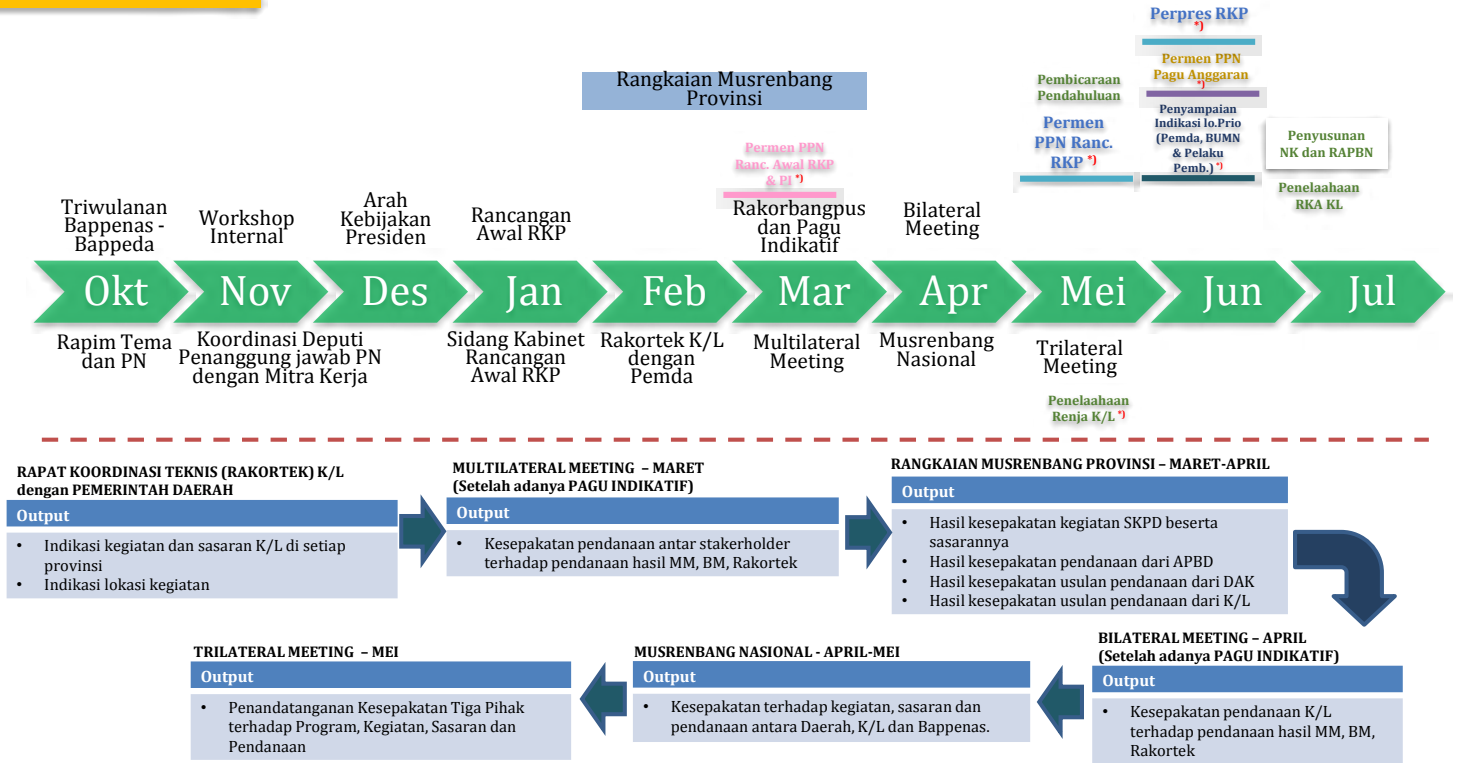
Sepanjang tahun 2017 ini, banyak kegiatan yang dilakukan BPIW Kementerian PUPR, melalui sekretariat dan 4 pusatnya. Kegiatan yang dilakukan Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR antara lain Evaluasi Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur PUPR di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 29 Ternate-Sofifi-Daruba dan WPS 30 Ambon-Masohi, serta *Review Renstra PUPR 2015-2019*. Pusat ini juga melakukan Penyusunan Skema Pembiayaan Keterpaduan Infrastruktur. Penyusunan skema pembiayaan juga akan

dilakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran infrastruktur. Selain itu Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR akan melakukan Rencana Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur PUPR Untuk Penanganan Isu Strategis Nasional. Program lain yang menjadi perhatian adalah Peningkatan Konektivitas Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar.

Kemudian, kegiatan yang dilakukan Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, seperti Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020, keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. Selanjutnya akan dilakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk *Review Penyusunan Program Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan* dengan Infrastruktur PUPR di 3 kategori WPS, yakni Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, Pusat Pertumbuhan Terpadu, dan Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang.

Sepanjang tahun 2017 ini, banyak kegiatan yang dilakukan BPIW Kementerian PUPR, melalui sekretariat dan 4 pusatnya.

# JADWAL PROSES PENYUSUNAN RKP 2018



Pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) di empat kota di Indonesia, juga menjadi perhatian Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR.

Pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) di empat kota di Indonesia, juga menjadi perhatian Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Pra Konreg yang dilakukan pada bulan Maret ini akan dilaksanakan di empat kota, yakni Palembang, Surabaya, Manado, dan Kupang.

Tidak hanya itu, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR tersebut juga akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Kementerian PUPR terhadap Pengembangan Wilayah I, Jawa dan Sumatera.

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis juga melakukan beberapa kegiatan seperti Penyusunan Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas dan Rencana Aksi Implementasi Keterpaduan Program dalam Kawasan Strategis (diluar WPS Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar). Tidak hanya itu, pusat tersebut juga akan melakukan Rencana Aksi Implementasi Keterpaduan Program WPS, Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan*

Infrastruktur PUPR Terpadu Destinasi Pariwisata Laboan Bajo, dan Penyusunan Infrastruktur *Masterplan* dan *Development Plan* PUPR Kawasan Patimban.

Selanjutnya akan dilakukan Penyiapan Dokumen Pinjaman Luar Negeri Program Infrastruktur Kawasan Pariwisata, Percepatan Implementasi Program Pengembangan WPS 6 Merak - Bakauheni - Bandarlampung- Palembang- Tanjung Api-Api (MBBPT), Pengelolaan Anjungan Cerdas, dan Pengembangan Sistem Monitoring Tanah (Simonah).

Program 2017 yang dilakukan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan seperti Keterpaduan Program Infrastruktur PUPR di 5 Kota Pusaka, Penyusunan Studi Penetapan dan Pra Desain Kawasan Prioritas Kota Lama Semarang, dan Dukungan Perencanaan Kawasan Pantai Utara Jakarta atau NCICD.

Program lain yang akan dilakukan seperti *Review Masterplan*, *Development Plan* dan Penyusunan

*Sekretariat BPIW akan melakukan pemutakhiran database BPIW dengan teknologi Big Data serta pemutakhiran data spasial pengembangan infrastruktur wilayah.*

Pra Desain Kota Baru Tanjung Selor dan sekitarnya. Selanjutnya juga akan dilakukan Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* Kawasan Perkotaan di sekitar Danau Toba, dan Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* Kota Baru Sorong. Selanjutnya akan dilakukan Implementasi Pengembangan Kota Baru Sofifi, Maja dan Pontianak. Kemudian Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan akan melaksanakan Penyiapan Rencana Aksi Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*) dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan di Indonesia,

Selain itu dilakukan penyusunan *Masterplan* dan Pra Desain KPPN di Pulau Sumatera, Sulawesi, Pulau Sumbawa, dan Pulau Kalimantan, serta Penyiapan Ketepaduan Pengembangan Infrastruktur PUPR untuk Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

Sekretariat BPIW akan melakukan pemutakhiran *database* BPIW dengan teknologi *Big Data* serta pemutakhiran data spasial pengembangan infrastruktur wilayah. Tidak hanya itu, Sekretariat BPIW juga akan melakukan Sistem Pengendalian Keuangan yang Berbasis Software demi

mendukung pengelolaan keuangan yang efektif, efisien transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, Sekretariat Mendukung Kementerian PUPR Menuju Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Pemetaan wilayah dan kawasan potensial kerja sama serta penyusunan skema kerja sama untuk mendukung keterpaduan infrastruktur wilayah.

Untuk proses program 2018, BPIW melakukan konsinyasi untuk memfinalnkan program-program yang belum terlaksana di tahun 2015 dan 2016, untuk dimasukkan ke program 2018. Program yang tidak bisa dibiayai, programnya digabungkan. "Kita melakukan *review* terhadap program-program tersebut. Saya kira ada 16 ribuan program yang dievaluasi. Program yang kita himpun terbatas pada masalah pembangunan strategis. Jadi sekitar 40% dari alokasi dana, harus bisa diarahkan menjadi program terintegrasi yang bertematik dan berdaya guna," ucap Rido lagi. **Tim Redaksi**

## PROGRAM-PROGRAM INFRASTRUKTUR PRIORITAS KPPN DARUBA



Salah satu contoh isi dari masterplan KPPN yang dibuat BPIW, yakni KPPN Daruba





## Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman tidak dapat lepas dari pengaruh eksternal seperti pertumbuhan dan penyebaran penduduk, pertumbuhan industri konstruksi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pengguna infrastruktur. Oleh sebab itu, persoalan yang dihadapi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur menjadi semakin kompleks dan tidak mungkin dapat diatasi dengan cara-cara lama yang telah dilakukan sebelumnya. Kontinuitas penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur menjadi penting untuk menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan-tantangan ini. Teknologi yang dikembangkan dari berbagai riset adalah salah satu caranya.

Buku ini ditulis oleh Bapak R. Pamekas, seorang peneliti senior di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR. Tulisan yang ada di dalam buku ini adalah kumpulan dari makalah ilmiah yang diantaranya sudah dipublikasikan di majalah ilmiah yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Selain itu, tulisan juga diambil dari prosiding seminar dan workshop, diskusi teknis dan pertemuan ilmiah sejenis.

Buku ini disusun dalam 10 bab, yang di dalam setiap bab dibahas satu permasalahan. Bab 1 sampai 3 membahas model identifikasi, pengukuran untuk memecahkan masalah infrastruktur kawasan permukiman. Bab 4, 5, 6, 8, dan 15 membahas model penanganan masalah infrastruktur di suatu wilayah yaitu di Batam, Samarinda, Yogyakarta, perbatasan Paloh dan Sajingan Besar. Topik penanganan air bersih di permukiman dibahas pada bab 7, 9, 10, 11, dan bab 20. Penanganan sanitasi dan persampahan dibahas pada bab 12, 13, dan 17. Bab-bab lainnya juga membahas topik yang tidak kalah pentingnya untuk disimak.

Model-model yang disajikan dalam setiap tulisan tentunya adalah hasil penelitian penulis yang cukup panjang. Setiap model digambarkan dalam bentuk bagan yang menunjukkan awal permasalahan, identifikasi, hingga solusi-solusi yang ditawarkan. Setiap hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai rujukan yang perlu dipertimbangkan sebagai salah satu referensi dalam menyusun kebijakan pengelolaan kawasan permukiman, terutama di Kementerian PUPR yang salah satu tugasnya membangun infrastruktur perumahan, permukiman, termasuk mengelola sanitasi. **(Mutri)**

“ Model-model yang disajikan dalam setiap tulisan tentunya adalah hasil penelitian penulis yang cukup panjang. Setiap model digambarkan dalam bentuk bagan yang menunjukkan awal permasalahan, identifikasi, hingga solusi-solusi yang ditawarkan. ”



# Istilah Seputar Urban

Banyak istilah seputar urban. Berikut rangkuman istilah seputar urban yang dihimpun dari Kamus Pengembangan Wilayah BPIW.

**Urban:** Sifat mengkota

**Urban Fabric:** Pembangunan karakter fisik suatu urbanisme yang menekankan pada jenis bangunan, ruang terbuka, badan jalan, tetapi mengecualikan aspek sosial-budaya dan ekonomi.

**Urbanisasi:** Perubahan secara keseluruhan atau transformasi tatanan masyarakat yang semula dominan perdesaan menjadi dominan perkotaan. Dalam arti terbatas juga disebut penambahan penduduk suatu kota sebagai akibat migrasi penduduk dari wilayah perdesaan sekitarnya atau karena perpindahan penduduk dari kota lain.

**Suburbanisasi:** Pengembangan wilayah yang semakin menonjol dan akan semakin berpengaruh nyata di dalam proses penataan ruang di sekitar wilayah perkotaan.

**Urban Containment:** Konsep/Strategi untuk mencegah perluasan kawasan perkotaan ke arah luar dan mendorong perkembangan ke dalam kawasan perkotaan dengan pelestarian bentang alam dan kawasan pertanian.

**Urban Community:** Masyarakat perkotaan

**Urban Decay (kemunduran kota):** (1) kemerosotan kota yang dapat disebabkan oleh konflik, jumlah penduduk merosot, lapangan kerja kurang, habisnya sumber daya yang menjadi andalan kota tersebut dan perkembangan terhenti. (2) kemunduran kota industri berat yang diakibatkan kota tersebut ketinggalan zaman dan daerah-daerah yang menderita karena iklim yang tidak ramah dan kecenderungan gejolak ekonomi.

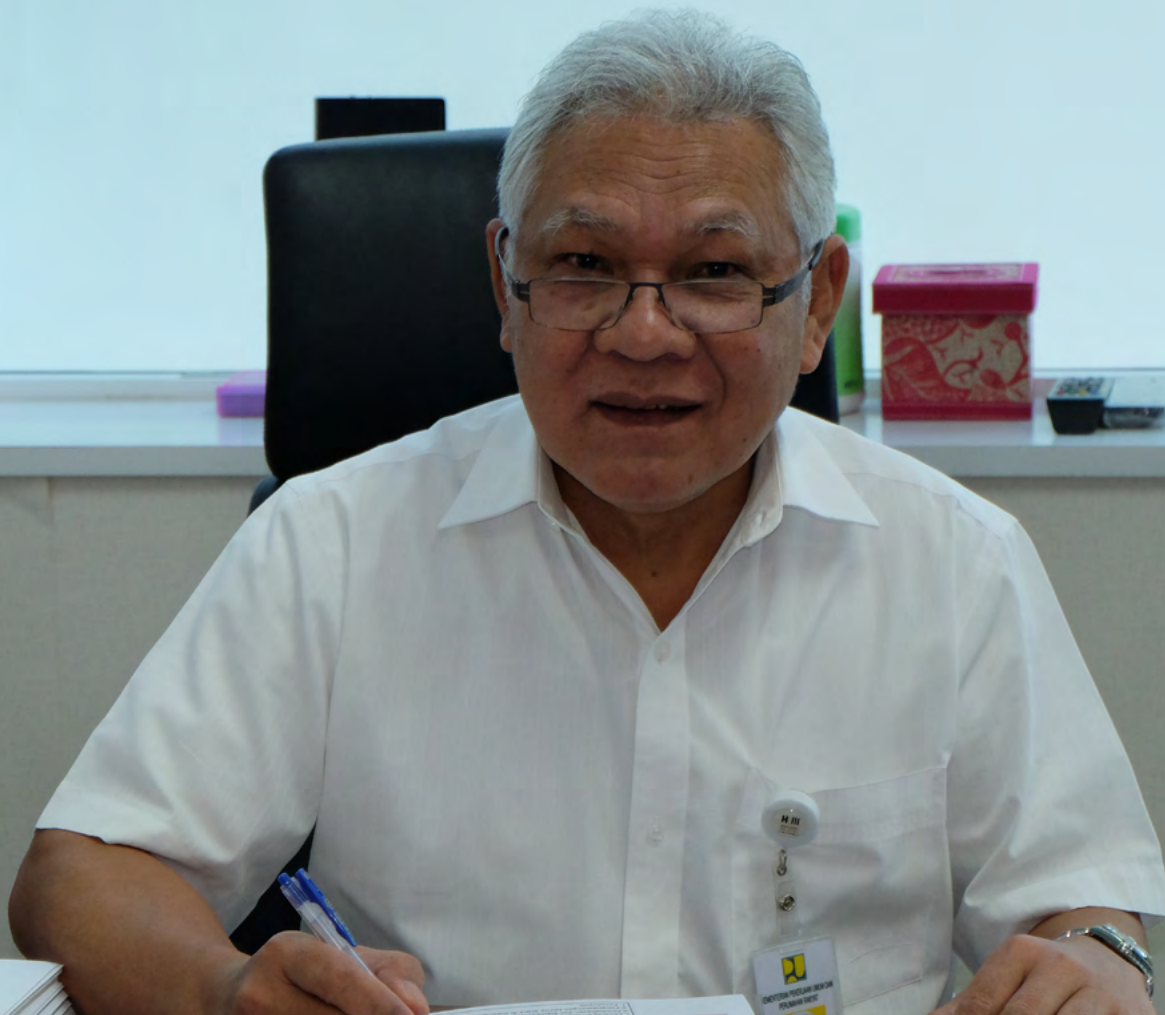
**Urban Sprawl:** (1) pembangunan kota yang tidak terkendali/ terkontrol (2) suatu pertumbuhan dari wilayah perkotaan yang menuju suatu proses tipe pembangunan penggunaan lahan yang beragam di daerah pinggiran kota.

**Urban Influenced Region (Wilayah Pengaruh Kota):** Wilayah yang terkena pengaruh kegiatan perekonomian suatu kota.

**Urbanite:** Orang perdesaan yang sudah masuk kota atau yang potensial menjadi warga kota.

**Sumber:** Kamus Istilah Pengembangan Wilayah





# Pra Konreg Hasilkan Kegiatan Prioritas yang Terpadu dan Sinkron

**Ir. HARRIS HASUDUNGAN BATUBARA, M.Eng.Sc**

*Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW*

Pada tahun ini, kembali digelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan Konsultasi Regional (Konreg). Kegiatan yang membahas perencanaan pembangunan infrastruktur untuk tahun 2018 tersebut melibatkan stakeholders. Pra Konreg yang akan digelar di 4 kota pada bulan Maret tersebut diharapkan mendapatkan output berupa kegiatan-kegiatan prioritas yang terpadu dan

yang sinkron didalam kawasan maupun antar kawasan didalam WPS dan antar WPS. Seperti apa persiapan BPIW menjelang Pra Konreg?. Berikut penjelasan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Kementerian PUPR, Ir. Harris Hasudungan Batubara, M.Eng.Sc, saat diwawancarai Buletin Sinergi, beberapa waktu lalu.



### **Apa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg tahun ini?**

Pra Konreg sebetulnya forum konsolidasi dan koordinasi dengan daerah. Disamping itu kita sudah membuat rencana mengenai apa saja pembangunan infrastruktur yang akan kita laksanakan tahun 2018. Untuk itu kita menyusun *masterplan* dan *development plan*. Apalagi Pak Menteri beberapa waktu yang lalu menginginkan untuk membumikan pengembangan wilayah yang sudah dicanangkan para *founding fathers* kementerian kita seperti Pak Sutami dan Pak Purnomosidi. Jadi pengembangan wilayah itu kita terjemahkan dalam *masterplan* dan *development plan*, yang mana daerah diseluruh Indonesia, kita bagi didalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. Kemudian didalam WPS ada kawasan-kawasan, seperti Kawasan Perkotaan, Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan, pelabuhan, bandara, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Di kawasan-kawasan itulah kita membuat *masterplan* dan *development plan*. Kita membuat *masterplan* dan *development plan* melihat dari kebutuhan akan infrastruktur PUPR di kawasan itu, sehingga bisa berfungsi dan beroperasi. Kalau kawasan tersebut bisa beroperasi dan berfungsi, maka akan berdampak pada pertambahan pajak dan banyak tenaga kerja yang dapat terserap. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Itu esensi dari Pra Konreg yang pertama.

Kemudian esensi yang kedua dari Pra Konreg seperti ini, Indonesia terbagi atas wilayah barat dan timur. Didalam wilayah barat dan timur itu ada WPS-WPS, dimana ada kawasan-kawasan yang perlu kita kembangkan dengan membuat *masterplan* dan *development plan*, sehingga pertumbuhan barat dan timur itu seimbang, tidak ada lagi ketimpangan. Sehingga nantinya pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah Indonesia. Bila pembangunan infrastruktur sudah bagus seluruhnya, maka biaya logistik pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain misalnya, dapat ditekan.

Setelah itu kita juga perlu memadukan dan mensinkronkan terutama kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan unit organisasi atau unor di Kementerian PUPR seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA), dan Perumahan. Jangan sampai misalnya,

Ditjen Perumahan membangun rumah susun atau rusun tapi suplai air tidak ada. Sehingga perlu kita padukan dan sinkronkan. Keterpaduan tersebut dilakukan juga dengan melibatkan pemerintah daerah. Soal kewenangan pemerintah pusat dan daerah juga akan kita padukan dan sinkronkan sehingga kawasan-kawasan yang ada, bisa diisi dengan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kewenangan masing-masing. Itu esensi dari pelaksanaan Pra Konreg.

### **Apa yang menjadi tantangan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pra Konreg?**

Tantangan yang kita hadapi adalah sumber daya manusia terutama terkait pemahaman yang sama mengenai pengembangan wilayah. Jadi merupakan hal yang positif ketika kita membuat kamus istilah pengembangan wilayah, karena pada akhirnya kita punya pemahaman yang sama terhadap nomenklatur yang ada. Jadi ada panduan. Kita selalu membuat panduan untuk itu.

### **Seperti apa persiapan Pra Konreg yang dilakukan BPIW?**

Persiapan yang kita lakukan, pertama membuat *masterplan* dan *development plan* dulu. Apa saja yang kita harus lakukan dan kerjakan sesuai dengan prioritas nasional yang tertutang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Prioritas nasional juga menyebutkan beberapa kawasan, seperti kawasan industri. Namun kawasan industri yang mana menjadi prioritaas nasional. Sehingga nanti kawasan tersebut yang kita tangani sangat prioritas. Terkait hal itu kita juga mendapatkan arahan dari Bappenas.

### **Daerah mana saja yang dijadikan tempat pelaksanaan Pra Konreg dan apa yang menjadi alasan memilih daerah-daerah tersebut?**

Kalau kita mempersiapkan Pra Konreg di 4 tempat pada bulan Maret nanti. Untuk Pulau Sumatera, kita pilih Palembang. Jadi seluruh daerah di Pulau Sumatera berkumpul untuk melakukan keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur di Palembang. Kemudian untuk di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat kita rencanakan diadakan di Surabaya. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, kita rencanakan diadakan di Kupang. Untuk Sulawesi, Papua, dan Maluku, direncanakan diadakan di Manado. Mengenai tempat penyelenggaraan Pra Konreg tersebut, nantinya akan

Soal kewenangan pemerintah pusat dan daerah juga akan kita padukan dan sinkronkan, sehingga kawasan-kawasan yang ada, bisa diisi dengan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kewenangan masing-masing. Itu esensi dari pelaksanaan Pra Konreg.



Rapat Persiapan Pra Konreg 2017

Sumber: Dok. BPIW

kita mintakan persetujuan dari para pimpinan kita.

Dasar pemilahan daerah-daerah yang menjadi peserta Pra Konreg ini berdasarkan aksesibilitas dan sarana yang ada. Misalnya di Palembang itu nanti ada 10 provinsi yang akan hadir. Dari kota itu apakah dapat mengkamodir 10 provinsi itu. Kalau misalnya 1 provinsi yang hadir 50 orang, maka kira-kira total yang akan hadir 500 orang. Nanti masing-masing provinsi akan kita tempatkan ruangan sendiri-sendiri. Disitu kita bahas dan padukan. Diruang itu nanti ada dari Bina Marga, Cipta Karya, SDA, dan Penyediaan Perumahan. Selain itu juga ada beberapa Bappeda dan Kepala Dinas dari Pemerintah Provinsi. Disitu kita diskusikan terpadu atau tidak, sinkron atau tidak, dimana kawasannya, dan apakah kawasan itu mendukung prioritas nasional.

BPIW sudah membuat *masterplan* dan *development plan* yang saat ini sedang ditajamkan oleh Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW. Penajaman itu untuk menentukan yang mana yang menjadi prioritas dari *masterplan* dan *development plan* tersebut. Hal ini juga dilakukan mengingat keterbatasan anggaran yang kita miliki.

### Hasil yang didapat dari Pra Konreg tahun 2017 ini berupa apa, dan apa tindak lanjut dari pelaksanaan Pra Konreg tersebut?

*Output* dari Pra Konreg nanti kegiatan-kegiatan prioritas yang terpadu dan yang sinkron didalam kawasan maupun antar kawasan didalam WPS dan antar WPS itu sendiri. Kita upayakan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan dilakukan itu, terpadu dan sinkron. Keluaran itu kita akan kita bawa pada Musyawarah Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan April mendatang. Jadi Musrenbang itu nanti sudah diketahui berapa anggaran untuk Kementerian PUPR.

Sementara kita sudah memiliki *shopping list* atau daftar belanja infrastruktur yang akan dibangun. *Shopping list* ini yang sudah disepakati dan sudah didiskusikan dengan pemerintah daerah. *Shopping list* ini merupakan hasil dari Pra Konreg dan Konsultasi Regional atau Konreg. Final penyinggannya di Musrenbangnas yang nantinya akan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga atau RKAKL. Nantinya akan menjadi Daftar Isian

*Output* dari Pra Konreg nanti berupa kegiatan-kegiatan prioritas yang terpadu dan yang sinkron didalam kawasan maupun antar kawasan didalam WPS dan antar WPS. Kita upayakan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan dilakukan secara terpadu dan sinkron.

Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Itu konsep yang kita lakukan dalam rangka membumikan pengembangan wilayah seperti yang disebut Pak Menteri.

**Bagaimana BPIW menyiapkan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program dalam Pra Konreg 2017 ini?**

Jadi Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan membuat *masterplan* dan *development plan*, misalnya dalam satu kawasan. Nanti akan terlihat infrastruktur apa saja yang akan dibangun di suatu kawasan. Bila sudah dibangun infrastrukturnya, maka suatu kawasan akan bisa beroperasi dan berfungsi. Disamping itu kita juga melihat anggaran yang ada terbatas. Oleh karenanya kita menentukan kawasan mana yang menjadi prioritas untuk dibangun dengan anggaran tersebut. Misalnya kalau kita bicara KSPN, maka yang tercantum dalam RPJMN ada 10 KSPN yang prioritas. Namun dikarenakan keterbatasan dana, pemerintah memilih 3 dari 10 KSPN yang prioritas tersebut. Ketiga KSPN itu adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Dari 3 KSPN ini kita lihat lagi infrastruktur apa yang akan dibangun pada tahun pertama, tahun 2018 nanti. Jadi dikerucutkan lagi agar anggarannya bisa efisien. Bila tidak terlalu prioritas maka dilaksanakan tahun 2019. Akan tetapi yang paling utama adalah infrastruktur apa yang akan dibangun terlebih dahulu. Biasanya infrastruktur jalan yang lebih dulu dibangun.

**Dari pelaksanaan Pra Konreg dan Konreg ini, apakah juga sudah dapat ditentukan kawasan mana yang**

**memerlukan pembiayaan dari pihak swasta?**

Nanti kita lihat, pengembangan salah satu kawasan apakah layak secara finansial untuk ditawarkan ke swasta. Soalnya kalau tidak layak secara finansial, swasta juga berat menanggungnya. Tidak hanya dengan swasta, kita juga dapat memberikan penugasan ke BUMN. Disitu juga terlihat, mana pembiayaan infrastruktur yang dibebankan ke pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD. Termasuk juga mana pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai melalui *Corporate Social Responsibility* atau CSR. Skema pembiayaan tersebut dibuat saat kita melaksanakan *development plan*.

**Apa harapan Bapak dari penyelenggaraan Pra Konreg kali ini?**

Harapan kita Pra Konreg dapat berjalan sesuai rencana dan bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang memang sangat dibutuhkan. Jadi bukan didasari pada keinginan, tapi kebutuhan pengembangan kawasan tersebut. Hal ini disebabkan anggaran yang terbatas.

**Dengan anggaran yang terbatas, apa langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam memprogram pembangunan infrastruktur yang terpadu agar dapat tepat sasaran?**

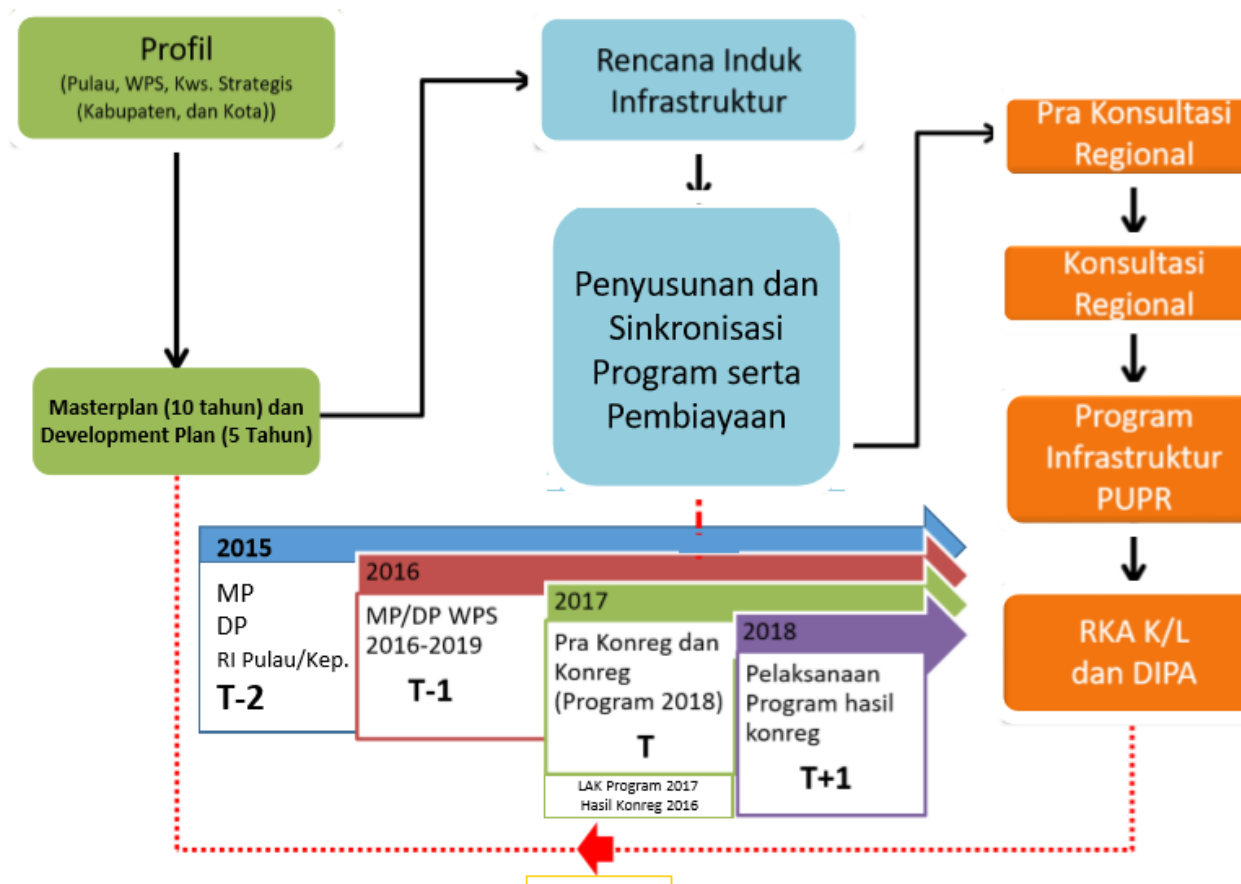
Memang sudah seharusnya pembangunan infrastruktur itu dapat tepat sasaran. Untuk menuju ke arah itu, kita punya skenario, dimana hasil dari Pra Konreg kita dapatkan *shopping list*. Kita juga lakukan klasifikasi *shopping list*, mana yang paling penting



Program pembangunan infra-struktur yang kita lakukan memang harus terpadu dan tepat sasaran. Untuk itu kita punya skenario, dimana hasil dari Pra Konreg kita dapatkan *shopping list*. Kita juga lakukan klasifikasi *shopping list*, mana yang paling penting atau biasa kita sebut *base-line*, dan mana yang *second priority* atau disebut stok program.



**Pola Kerja Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR**



atau biasa kita sebut *baseline*, dan mana yang *second priority* atau disebut stok program. Jadi kalau nanti dananya bertambah tentunya kita ambil dari *second priority*.

Dengan demikian semua program infrastruktur itu kita susun melalui proses di Pra Konreg. Sebelum Pra Konreg, untuk level pemerintah pusat diawali dengan studi-studi yang tadi. Kemudian di daerah, program infrastruktur disusun melalui musyawarah pembangunan desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

Setelah studi dan musyawarah selesai dilaksanakan, kita lakukan Pra Konreg. Dalam Pra Konreg tersebut, kita koordinasi program dari kita dengan program provinsi. Itu sebetulnya yang kita harapkan, sehingga konsep perencanaan itu matang, baik tingkat pusat

maupun daerah. Bila konsep perencanaan sudah matang, maka tidak ada lagi infrastruktur yang lupa untuk diusulkan. Jadi proses pemrogramannya lebih efektif dan efisien, kecuali misalnya setelah Pra Konreg ada direktif dari Presiden. Hal itu tidak bisa kita hindari, dan dilakukan revisi.

**Kegiatan strategis apa saja yang dilaksanakan Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR pada tahun ini?**

Untuk tahun ini kegiatan kita konsentrasi penuh pada pelaksanaan Pra Konreg. Misalnya hasil dari *masterplan* dan *development plan* yang sudah disaring melalui Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, maka kami disini mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang membawa hasil dari *masterplan* dan *development plan* itu menuju ke tahap implementasi. Tentunya kami akan melihat dulu, dimana kawasan-

Bila konsep perencanaan sudah matang, maka tidak ada lagi infrastruktur yang lupa untuk diusulkan. Jadi proses pemrogramannya lebih efektif dan efisien.

kawasan yang perlu dikembangkan. Kemudian kita melihat apakah kawasan yang akan dikembangkan sudah siap untuk direalisasikan.

Kalau dilihat dari urutan sebelum pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maka harus ada dulu *feasibility study* atau FS. Kemudian juga harus dilakukan studi lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Misalnya bila perlu dilakukan pembebasan lahan, maka harus ada dulu lahannya. Kemudian, sebelum direalisasikan, disainnya harus ada dulu. Urutan-urutan inilah yang kita persiapkan.

**Kegiatan apa lagi yang menjadi perhatian Bapak?**

Sebetulnya di Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR ini, kami juga sedang berupaya memadukan proses melalui Sistem Manajemen Mutu atau SMM. Kita perlu membuat *standard operating procedure* atau SOP terkait sinkronisasi kegiatan-kegiatan sektor PUPR. Sehingga siapapun nanti yang menjabat setelah saya, dapat

menggunakan SOP yang kita buat. Untuk itu perlu dibuatkan SMM agar semakin bagus.

**Selama ini, apakah telah menggunakan SMM?**

Iya, kami bekerja menggunakan SMM, tapi belum tersertifikasi. Kami memperkuat SMM ini, dan kita berusaha untuk mendapatkan sertifikat *International Organization for Standardization* atau ISO. Hal ini sebagai pendorong, sehingga kita bekerja lebih efisien dan efektif. Dengan demikian kualitas kerjanya semakin baik.

**Apa target yang ingin dicapai dari beberapa kegiatan strategis tersebut?**

Target kita hingga akhir 2017 nanti, mempersiapkan segala hal yang saya sampaikan tadi, seperti Pra Konreg.

Bila misalnya, harus dilakukan pembangunan ruas jalan, maka kita lihat, apakah untuk membangun ruas jalan itu butuh FS atau tidak. Kalau butuh FS, kita rekomendasikan untuk disediakan FS nya. Inilah yang dibahas pada saat Pra Konreg.

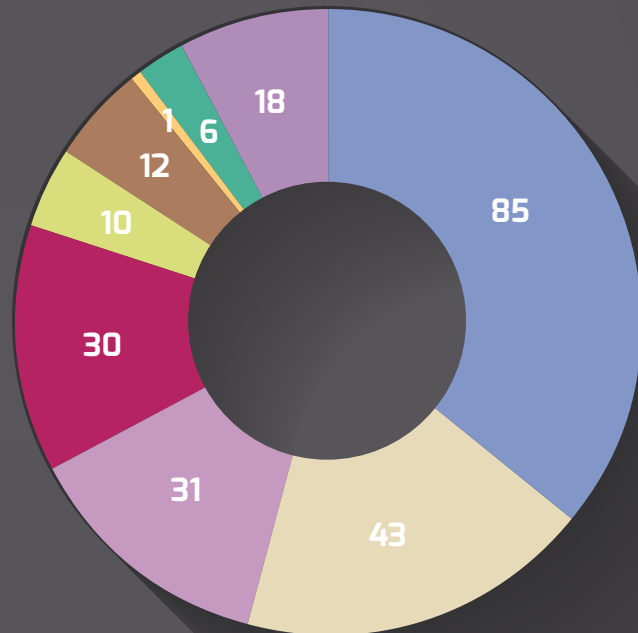




# Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan hal itu. Guntingan berita kami sarikan dari 6 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan. Selama bulan Februari 2017. Total ada 236 berita dari 7 media periode 1 Februari - 28 Februari 2017

1 Pembangunan jalan/ jalan tol/jembatan	85
2 Pengembangan perkotaan/ <i>smart city</i> / kota pusaka	43
3 Perumahan/rusun/peremukiman	31
4 Pembiayaan infrastruktur/anggaran	30
5 Pengelolaan air/ sungai/bendungan/sanitasi	10
6 Pembebasan lahan/pertanahan	12
7 Penataan ruang	1
8 Pengembangan kawasan pariwisata	6
9 Lain-lain	18
Total	236



Pemberitaan pada bulan Februari 2017 totalnya mencapai 236 berita. Berita tersebut didominasi oleh pemberitaan pembangunan jalan tol, serta pembangunan jembatan yang mencapai 85 berita. Dengan fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah fokus pada infrastruktur tersebut. Sepanjang bulan Februari ini, pemerintah masih konsern pada konektivitas antar wilayah.







### Berita menarik yang berkaitan dengan pengembangan Infrastruktur PUPR, sepanjang bulan Februari 2017:

1. Rabu, 1 Februari 2017, Investor Daily, (Halaman 23)  
PUPR Nilai swasta kian berminat bangun tol.  
Kementerian PUPR menyatakan minat investor swasta maupun badan usaha milik negara untuk membangun jalan tol kian bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir.
2. Jumat, 10 Februari 2017, Investor Daily (Halaman, 6)  
Pembangunan tol cigatas percepat pengembangan selatan jawa.  
BPIW KEMENTERIAN PUPR mendukung pengembangan infrastruktur di wilayah jawa bagian selatan
3. Senin, 12 Februari 2017, Media Indonesia (Halaman, 17)  
Lelang PAKet PU-Pera Selesai Maret.  
Kementerian PUPR memprioritaskan anggaran kementerian PUPR dalam bentuk belanja modal yang bersifat menambah asset negara.
4. Kamis, 16 Februari 2017, Koran Tempo (Halaman, 18)  
Anggaran Infrastruktur untuk Papua Ditambah.  
Kementerian PUPR menganggarkan Rp 7,6 Triliun untuk pembangunan infrastruktur di Papua.
5. Sabtu-Minggu, 18-19 Februari 2017, Koran Tempo (Halaman, 44)  
Desain Baru Tol Semarang-Demak Lewati Tepi Laut.  
Kementerian PUPR mendesain ulang jalur jalan tol Semarang-Demak agar kelak mempunyai dua fungsi.
6. Senin, 27 Februari 2017, Koran Tempo (Halaman, 20)  
Pembangunan Fasilitas Air Baku Dikebut.  
Kementerian PUPR akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, seperti sarana dan prasarana air baku.
7. Selasa, 28 Februari 2017, Investor Daily (Halaman, 6)  
Pemerintah Imbau Pelaku Jasa Konstruksi Miliki spesialisasi.  
Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Basuki Hadimuljono mengimbau agar para pelaku jasa konstruksi memiliki spesialisasi sesuai keahlian untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing.
8. Kamis, 23 Februari 2017, Bisnis Indonesia (Halaman, 7)  
Kontrak 3 Ruas Ditandatangani.  
Kementerian PUPR dan Investor menandatangani perjanjian perusahaan jalan tol tiga ruas baru senilai Rp 27 triliun.
9. Selasa, 21 Februari 2017, Kompas (Halaman, 24)  
Galang Koin untuk Perbaikan Jalan Nasional.  
Dana yang Terhimpun Akan Diserahkan ke Kementerian PUPR.
10. Kamis, 16 Februari 2017, Investor Daily (Halaman, 6)  
PUPR Kebut Pembangunan Jalan Trans-Papua  
Jalan lintas perbatasan Papua sepanjang 4.357 KM diharapkan rampung pada 2018

# BPIW Dukung Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Jawa Bagian Selatan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan infrastruktur di wilayah Jawa bagian Selatan. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat menerima kunjungan kerja Rektor Universitas Siliwangi, Prof Rudi Priyadi dan Manusia Unggul Bawalaksana (Maung) *Foundation* di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (8/2).

Rido mengatakan, BPIW mendukung pengembangan infrastruktur di wilayah Jawa bagian Selatan, salah satunya rencana pengembangan jalan tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas). Ke depan pembangunan jalan tol Cigatas tersebut akan tersambung sampai Yogyakarta. "Saat ini untuk jalan nasional sudah ada yang menghubungkan Cileunyi-Garut-Tasikmalaya sampai Yogyakarta. Ke depan perlu dibangun

jalan tol sebagai jalan alternatif yang dapat mendukung percepatan pengembangan di wilayah Jawa bagian selatan," terangnya. Menurutnya, pengembangan infrastruktur yang mewujudkan konektivitas akan memberikan peluang percepatan dalam pengembangan berbagai aspek. "Keberadaan infrastruktur yang memadai memang

Rido mengatakan, BPIW mendukung pengembangan infrastruktur di wilayah Jawa bagian Selatan, salah satunya dengan rencana pengembangan jalan tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas). Ke depan pembangunan jalan tol Cigatas tersebut akan tersambung sampai Yogyakarta.

merupakan salah satu syarat utama yang dapat menjadikan pengembangan wilayah berlangsung cepat," paparnya. Selain rencana pengembangan jalan tol, lanjut Rido, akan ada banyak lagi sejumlah

rencana pengembangan infrastruktur PUPR di kawasan Jawa bagian selatan yang salah satunya dapat mendukung pengembangan Tasikmalaya dan sekitarnya.

Rido menyatakan, saat ini Kementerian PUPR mengembangkan infrastruktur dan wilayah menggunakan metoda berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan

Strategis (WPS). Pola pengembangan WPS ini diterapkan merupakan upaya mengatasi ketimpangan pembangunan, membangun konektivitas serta merespon permasalahan-permasalahan pembangunan wilayah dan kota yang muncul.

BPIW menyambut baik antusias Universitas Siliwangi negeri di Tasikmalaya dan Manusia Unggul

Maung *Foundation* yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan infrastruktur dan wilayah, khususnya terhadap Tasikmalaya dan sekitarnya.

Di tempat yang sama, Doedoeng Zenal



Jalur lintas selatan kerap menjadi jalur alternatif bagi pemudik menuju Jawa Tengah dan sekitarnya.

Sumber: Dok. BPIW

Arifin, Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW mengatakan, untuk mengembangkan Tasikmalaya memang memerlukan adanya konektivitas yang efektif.

“Misalnya dengan mengaktifkan Landasan Udara Wiriadinata di Tasikmalaya menjadi bandara komersil,” terangnya. Menurutnya, saat ini waktu tempuh melalui jalan darat ke Tasikmalaya dari Jakarta dapat mencapai 8 hingga 9 jam, sehingga pengaktifan kembali bandara di Tasikmalaya menjadi utama.

“Saat ini menuju Aceh atau Medan saja bisa hanya 2,5 jam karena melalui transportasi udara,” ujar Doedoeng. Menurutnya, dengan akses yang mudah akan dapat menarik investor untuk dapat berinvestasi di Tasikmalaya.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan pemahaman yang sama terkait pengembangan wilayah dari masyarakat luas di Tasikmalaya, agar rencana pengembangan dapat terjadi percepatan dan berlangsung lancar. Sementara itu, Rektor Universitas Siliwangi,

Prof Rudi Priyadi mengatakan, Universitas Siliwangi dan Maung *Foundation* akan melakukan berbagai langkah-langkah yang diperlukan agar tercipta kesadaran dan persepsi dari masyarakat Tasikmalaya mengenai perlunya pengembangan infrastruktur dan wilayah.

“Dalam hal ini Unsil akan mengoptimalkan

**Rektor Universitas Siliwangi, Prof Rudi Priyadi mengatakan, Universitas Siliwangi dan Maung *Foundation* akan melakukan berbagai langkah-langkah yang diperlukan agar tercipta kesadaran dan persepsi dari masyarakat Tasikmalaya mengenai perlunya pengembangan infrastruktur dan wilayah.**

peran sebagai pusat pengetahuan bagi masyarakat Tasikmalaya,” terangnya.

Rudi menerangkan, pada tahap awal Unsil, Maung *Foundation* dan BPIW Kementerian PUPR dapat menggelar lomba menulis ilmiah mengenai Pembangunan Tasikmalaya Menuju 2045. “Lomba tersebut ditujukan

untuk masyarakat luas. Juara utamanya nanti dapat dipresentasikan dalam seminar nasional, yang didalamnya ada para pakar perkotaan dan lainnya,” terang Rektor.

Ia mengatakan, seminar tersebut salah satunya ditujukan untuk para pemangku kepentingan di Tasikmalaya dan sekitarnya, agar pemahaman mengenai pengembangan

infrastruktur dan wilayah dapat diperbarukan.

Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara Unsil dan Maung *Foundation* untuk dapat mewujudkan percepatan pengembangan di kawasan Tasikmalaya dan sekitarnya.

Seperti diketahui, Universitas Siliwangi merupakan institusi perguruan tinggi negeri di Kota Tasikmalaya. Adapun, Maung

*Foundation* merupakan yayasan sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan sumber daya manusia. **(ris/infoBPIW)**



# Percepatan Infrastruktur PUPR Tingkatkan Potensi KEK

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanah Air. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Seminar Nasional "Prospek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pembangunan Ekonomi," di Jakarta, Selasa, (14/2).

Adapun yang menjadi narasumber pada seminar tersebut adalah Direktur Pengembangan Wilayah Industri II, Kementerian Perindustrian, Busharmaedi, Kepala Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok, ITB, Prof. Senator Nur Bahagia serta Perwakilan Kamar Dagang Indonesia, Alfonso Pardede.

Menurut Rido, saat ini Pemerintah Pusat telah menetapkan 11 KEK, yakni KEK Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe, KEK Sei Mangke di Kab. Simalungun, KEK Tanjung Kelayang di Kab. Belitung, KEK Tanjung Api-api di Kab. Musi Banyuasin, KEK Tanjung Lesung di Kab. Pandeglang, KEK Mandalika di Kab. Lombok Tengah, KEK Maloy di Kota Bontang, KEK Bitung di Kota Bitung, KEK Palu di Kota Palu, KEK Morotai di Kab. Pulau Morotai, dan KEK Sorong di Kab. Sorong.

Rido mengatakan, Kementerian PUPR menerapkan pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan atau biasa disebut Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokan pada 35 WPS. "KEK sendiri merupakan satu dari beberapa kawasan strategis yang ada dalam WPS," terangnya.

Dukungan terhadap pengembangan KEK, lanjutnya, dilakukan dengan penyusunan *masterplan* dan *development plan* yang



Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat memberikan paparan.

memuat program 10 tahunan, 5 tahunan, yang kemudian didetailkan ke dalam program jangka pendek dan tahunan. Desain programnya dilakukan dengan mengerahkan unit organisasi (unor) Kementerian PUPR, agar bersinergi, sehingga pembangunan infrastrukturnya akan sekaligus menjadi pengungkit nilai bagi KEK dan wilayah di sekitarnya.

Rido menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang dilakukan mulai dari dukungan jalan. Diantaranya, pembangunan jalan untuk 24 pelabuhan baru, pelabuhan penyeberangan, jaringan jalan perkotaan, pembangunan jalan lingkaran perkotaan, kawasan industri prioritas, kawasan pariwisata prioritas, 15 bandara baru serta intermoda jalur kereta api.

“Ada juga dukungan sumber daya air, seperti pembangunan 65 waduk, pembangunan jaringan irigasi baru untuk pengairan 1 juta hektar persawahan, rehabilitasi jaringan irigasi untuk pengairan 3 juta hektar persawahan, pembangunan sarana pengendali banjir, pembangunan pengaman pantai, serta peningkatan pengelolaan air baku,” papar Rido. Kemudian, lanjutnya, dukungan perumahan mulai dari pembangunan rumah umum tapak layak huni sebanyak 676.950 unit, pembangunan rumah khusus 50.000 unit, pembangunan rumah susun dan bantuan

percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, meningkatkan

### Dukungan terhadap pengembangan KEK, lanjutnya, dilakukan dengan penyusunan *Masterplan dan Development plan* yang memuat program 10 tahunan, 5 tahunan, yang kemudian didetailkan ke dalam program jangka pendek dan tahunan.

pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan industri serta memberikan

kawasan industri. “Tapi dapat juga di daerah yang sudah ada kawasan industri, namun kawasan tersebut sudah penuh dengan tenant,” terangnya.

la menerangkan, lahan kawasan industri besar paling rendah lima puluh hektar dalam satu hamparan.

“Untuk lahan kawasan industri kecil menengah paling rendah lima hektar dalam satu hamparan,” terangnya.

Sementara itu, Prof. Senator Nur Bahagia mengatakan, KEK merupakan kawasan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan

fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. “Dalam hal ini peran swasta lebih mendominasi karena konsep pengembangannya lebih menekankan pada *market driven*,” terangnya.

KEK ditujukan untuk meningkatkan investasi, daya saing, dan menciptakan lapangan kerja melalui promosi suatu lokasi yang diprioritaskan karena berbagai keunggulannya. “Misalnya lokasinya yang strategis, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, serta komitmen dukungan dari pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Dalam pengembangan KEK, lanjutnya, investasi swasta menjadi utama. Sehingga, dalam pengembangannya pemerintah terlebih dahulu harus mencari investor yang berminat dan nyata memberikan kepastian untuk berinvestasi.

Di sisi lain, Alfonso Pardede mengatakan, saat ini berbagai negara tengah berkompetisi menarik investor agar mau berinvestasi serta melakukan bisnis di wilayahnya. “Dengan begitu, pemerintah memang perlu makin memberi kemudahan berbisnis. Selain itu, kepastian juga merupakan hal penting bagi investor, agar mereka mau berinvestasi,” terangnya. Kemudahan berbisnis, lanjutnya, seperti kemudahan perizinan dan pajak. “Untuk kepastian bisnis terkait kontrak, keamanan dan lainnya,” tegas Alfonso. (ris/infoBPIW)



Sumber: Dok BPIW

stimulan pembangunan rumah swadaya.

“Termasuk dukungan Keciaptakaryaan, seperti pemenuhan air layak minum, penataan kawasan permukiman dan akses sanitasi,” paparannya.

Di tempat sama, Busharmaedi mengatakan, Kementerian Perindustrian dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional menempuh berbagai upaya, seperti melakukan

kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Menurutnya, penetapan lokasi KEK diharapkan dapat menciptakan percepatan dalam pertumbuhan sektor industri yang ujungnya pada berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara.

Melalui KEK, lanjutnya, perusahaan industri diwajibkan berada di dalam kawasan industri, kecuali di daerah yang belum ada

# Kunjungi BPIW, Pemerintah Jepang Tertarik Jajaki Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur

“Peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia menarik. Sehingga, kami ingin dapat turut bersama-sama mengembangkan berbagai infrastrukturnya,” kata Yoshikazu.

Pemerintah Jepang tertarik melakukan peninjauan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia. Hal itu terungkap saat Direktur Kerja Sama Internasional, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Yoshikazu Kuki didampingi stafnya, Yuriko Takanagi mengunjungi kantor Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (22/2). Kunjungan delegasi Pemerintah Jepang tersebut disambut langsung Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo didampingi Kepala Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat, Zevi Azzaino dan jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, Yoshikazu Kuki

mengakui, Pemerintah Jepang berminat melakukan berbagai peninjauan kerja sama pengembangan infrastruktur di Indonesia. “Peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia menarik. Sehingga, kami ingin dapat turut bersama-sama mengembangkan berbagai infrastrukturnya,” kata Yoshikazu. Ia menilai, pengembangan infrastruktur di Indonesia sangat prospektif karena banyak hal yang dapat dilakukan. Indonesia memiliki rentang wilayah yang luas dan penduduk yang terus tumbuh. Selain itu, lanjutnya, kerja sama yang terjalin juga diharapkan akan dapat semakin mempererat hubungan baik antara kedua negara. Menanggapi hal itu Bobby Prabowo menyatakan, Kementerian PUPR menyambut baik harapan Pemerintah Jepang yang ingin melakukan peninjauan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur. Pada pertemuan itu, Bobby juga menerangkan bahwa, Kementerian PUPR





Perwakilan Negara Jepang saat menjelaskan kunjungannya ke BPIW

Sumber: Dok. BPIW

memiliki sejumlah unit organisasi (unor) yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Unor-unor tersebut seperti BPIW, yang melakukan perencanaan keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR. Selanjutnya Direktorat Bina Marga sebagai pelaksana penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian Direktorat Sumber Daya Air sebagai pelaksana penyediaan infrastruktur pengairan dan Direktorat Penyediaan Perumahan sebagai pelaksana penyediaan infrastruktur perumahan dan hunian. Sedangkan Direktorat Cipta Karya sebagai unor yang melaksanakan penataan taman, sanitasi, air minum dan lainnya.

“Ada juga Sekretaris Jenderal yang berperan sebagai pengorganisasian unor-unor di Kementerian PUPR, serta Inspektorat Jenderal yakni unor yang berperan sebagai pegawai Unor-unor lain,” terangnya.

Menurut Bobby, Kementerian PUPR melalui BPIW menerapkan metode berbasis kewilayahan dalam mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur PUPR atau yang biasa disebut Wilayah Pengembangan

**Pengembangan infrastuktur di Indonesia sangat prospektif karena banyak hal yang dapat dilakukan. Indonesia memiliki rentang wilayah yang luas dan penduduk yang terus tumbuh.**

Strategis (WPS).

la menjelaskan, seluruh wilayah di Indonesia terkelompokan ke dalam 35 WPS. “WPS tersebut biasanya terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan

wisata, kota baru publik, kawasan lumbung pangan dan lainnya,” ujarnya.

Bobby juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia senantiasa terbuka untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Terkait hal itu, salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah yakni Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINAN). Program ini bertujuan agar program-program pemerintah dalam pengadaan infrastruktur dapat dipercepat.

Sementara itu, Zevi Azzaino juga mengapresiasi Pemerintah Jepang yang tertarik untuk bersama-sama mengembangkan infrastuktur di Indonesia.

la berharap, akan ada banyak kerja sama yang dilakukan Pemerintah Indonesia-Jepang terkait pengembangan infrastruktur.

**(ris/infoBPIW)**

# BPIW Gelar Bedah Kamus Istilah Pengembangan Wilayah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menggelar Bedah Kamus Istilah Pengembangan Wilayah di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (7/2). Acara tersebut dihadiri langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan serta jajaran pejabat di Kementerian PUPR.

Dalam sambutannya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Kamus Istilah Pengembangan Wilayah yang diterbitkan Kementerian PUPR diharapkan dapat menjadi referensi bersama dalam pemahaman terkait

pengembangan wilayah. "Saat ini ilmu kewilayahan diterapkan Kementerian PUPR untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, membangun konektivitas serta merespon permasalahan-permasalahan pembangunan wilayah dan kota yang muncul," paparnya.

Untuk itu, lanjut Basuki, pihaknya mengapresiasi atas terselenggaranya acara tersebut sebagai upaya sosialisasi dan penyamaan persepsi sekaligus *review* terhadap materi kamus, sehingga dapat diperoleh berbagai input untuk penyempurnaannya.

Sebelumnya, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka acara mengatakan, BPIW lahir pada tahun 2015 sebagai inovasi kelembagaan di Kementerian PUPR yang diamanatkan untuk menerpadukan perencanaan infrastruktur dan menskinronkan program yang berbasis pendekatan wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lanjut Rido, BPIW Kementerian PUPR telah

menyusun berbagai konsepsi baru sebagai *tools* menerpadukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Konsepsi tersebut melahirkan berbagai terminologi dan istilah kewilayahan baru yang memungkinkan belum dikenal secara luas.

"Terminologi multi disiplin itu digunakan secara masif di berbagai produk utama

BPIW Kementerian PUPR, khususnya *masterplan* dan *development plan*. Untuk

menghindari adanya multi konsepsi terhadap istilah atau terminologi pengembangan wilayah, dokumen perencanaan dan pemrograman yang dihasilkan BPIW sehingga disusun dalam kamus istilah pengembangan wilayah pada 2016,"

**"Saat ini ilmu kewilayahan diterapkan Kementerian PUPR untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, membangun konektivitas serta merespon permasalahan-permasalahan pembangunan wilayah dan kota yang muncul," paparnya.**

jelasan.

Ia berharap, kamus tersebut menjadi acuan dan alat komunikasi antara pemerintah, akademisi, badan legislatif, maupun masyarakat untuk memahami istilah atau terminologi yang sering digunakan dalam teori, praktik, maupun kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia.

Di tempat sama, Sekretaris BPIW yang juga Panitia Pelaksana, Dadang Rukmana menyatakan, teori dan konsep pengembangan wilayah yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur cakupannya multi disiplin keilmuan, sehingga kerap menimbulkan multi konsepsi terhadap istilah-istilah atau terminologi pengembangan wilayah tersebut.

"Kamus Istilah Pengembangan Wilayah yang dibedah ini telah diterbitkan Kementerian PUPR tahun 2016," terangnya. Ia menerangkan, Bedah Kamus ini bertujuan untuk mensosialisasikan sekaligus mereview Kamus Istilah Pengembangan Wilayah, guna

mendapatkan penyempurnaan kedepannya.

Adapun narasumber yang hadir untuk membedah kamus tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat PII, Dr Hermanto Dardak, Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang dan Kawasan Strategis Real Estate Indonesia, Ir Hari Ganie, Akademis Institut Teknologi Bandung, Prof. Tommy Firman, Akademisi



Universitas Udayana, Dr Ngakan Ketut Acwin serta Kepala Bidang Kawasan Strategis Ekonomi, Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian, Kartika Listriana.

Tommy Firman mengatakan, perkembangan



pengembangan wilayah saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Untuk itu, kamus yang disusun perlu mendapat revisi secara berkala. “Dalam kamus yang relatif kecil ini, tidak mungkin masuk seluruh istilah kata-kata mengenai pengembangan wilayah,” terangnya. Tommy mengapresiasi hadirnya kamus tersebut. Pasalnya, kehadiran kamus tersebut akan banyak membantu kalangan yang bergelut di bidang perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah dan masyarakat luas. “Kedepan kamus tersebut diharapkan dapat menampung banyak kata-kata yang terkait istilah pengembangan wilayah yang belum masuk (kamus-red),” terangnya.

Pembedah kamus penutup, Hermanto Dardak menjelaskan, metode pengembangan infrastruktur dan wilayah di Kementerian PUPR saat ini berbasis kewilayahan, yakni metode Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Kepala BPIW Periode 2015-2016 ini

kamus tersebut senantiasa mengikuti penyempurnaan-penyempurnaan,” papar Dardak.

**Ia berharap, kamus tersebut menjadi acuan dan alat komunikasi antara pemerintah, akademisi, badan legislatif, maupun masyarakat untuk memahami istilah atau terminologi yang sering digunakan dalam teori, praktik, maupun kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia.**

Usai bedah kamus, rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan *Distinguished Honorary Fellow* kepada Menteri PUPR dari ASEAN *Federation of Engineering Organisations* (AFEO). Penghargaan tertinggi

pengurus Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan PII.

Dalam acara ini para tamu undangan yang hadir yakni dari jajaran Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian juga hadir perwakilan pengurus Asosiasi Profesi seperti Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI), Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), dan Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (ALSI). Turut hadir pada acara tersebut Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI), Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP)



menjelaskan, kesamaan persepsi terhadap istilah pengembangan memiliki peranan yang penting karena akan berdampak terhadap penerapan pengembangan infrastruktur dan wilayah.

Menurutnya, inovasi yang dilakukan BPIW Kementerian PUPR perlu diapresiasi bersama. “Sambil diharapkan

dari AFEO tersebut diterima langsung Menteri PUPR berkat keberhasilannya dalam membangun infrastruktur yang efektif dan bermanfaat secara luas, yakni Jalan Lingkar Nagreg di Kabupaten Bandung dan Jembatan Merah Putih di Ambon. Selain itu ada juga, penyerahan *honorary member* kepada Rektor ITB dari AFEO serta pengukuhan

Indonesia, dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Selain itu juga hadir Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), serta beberapa praktisi pengembangan wilayah. ([tim/infoBPIW](http://tim/infoBPIW))

Sumber: Dok. BPIW



# Pemkab Sambas Kunjungi BPIW, Bertekad Percepat Pengembangan Infrastruktur



Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan berjabat tangan usai pertemuan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (24/2).

Rombongan Pemkab Sambas ini dipimpin langsung Bupati Sambas, Atbah Romlin Suhaili yang diterima Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan didampingi jajaran dan perwakilan Unit Organisasi di Kementerian PUPR.

Dalam kunjungan tersebut, Atbah mengatakan, perhatian yang besar terhadap Kabupaten Sambas dari pemerintah pusat merupakan kewajaran karena Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah perbatasan strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia).

Ia mengakui, saat ini di Kabupaten Sambas telah berdiri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk yang cukup membuat iri warga negara tetangga di wilayah tersebut. Hanya saja kehadiran PLBN tersebut, lanjutnya, masih perlu ditambah berbagai infrastruktur

penunjang lainnya agar manfaat pembangunannya makin dapat dirasakan masyarakat.

Selain itu, ungkapnya, penambahan berbagai infrastruktur penunjang akan makin mengokohkan kebanggaan dan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah Kabupaten Sambas.

Atbah menjelaskan, Pemkab Sambas telah memiliki strategi pengembangan infrastruktur dan kawasan dengan memprioritaskan Lima kawasan strategis, yakni pengembangan Kawasan Wisata Temajuk, Kompleks Kesultanan Sambas, Kebun Raya Sambas, Kawasan Wisata Gunung Senujuh dan Rencana Pengembangan Bandar Udara Perintis di Kabupaten Sambas. "Kawasan Wisata Temajuk dan Kompleks Kesultanan Sambas, menjadi prioritas pengembangan di Kabupaten Sambas karena kawasan tersebut memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya," terangnya.

Ia menambahkan, banyak wisatawan dari Malaysia dan Brunei mengunjungi Temajuk dan Kompleks Kesultanan Sambas, namun para wisatawan saat melakukan kunjungan

biasanya dilakukan pulang-pergi. "Sebab sarana dan prasarana di destinasi itu belum lengkap, seperti masih kurangnya hotel dan lainnya, sehingga manfaat yang diterima dari kunjungan wisatawan belum begitu optimal," ungkapnya.

Selain itu, ada pengembangan Kebun Raya Sambas dan Kawasan Wisata Gunung Senujuh. Kawasan tersebut perlu dikembangkan karena memiliki nilai strategis dari sudut fungsi, daya dukung lingkungan hidup serta kepentingan konservasi alam.

Terkait bandara, Atbah mengatakan, Kabupaten Sambas dirasa perlu melakukan terobosan dalam sarana transportasi, agar tingkat kunjungan wisatawan dapat semakin tinggi. "Dengan adanya bandara waktu tempuh menuju Sambas akan lebih singkat, sehingga peluang kunjungan ke Sambas juga akan makin banyak," terangnya.

Di tempat yang sama, Rido Matari Ichwan mengatakan, Kabupaten Sambas merupakan wilayah yang strategis. "Posisi Kabupaten Sambas masuk dalam bentang 2 WPS (Wilayah Pengembangan Strategis,-red), yakni WPS 20 Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas dan WPS 21 Temajuk-



uan dengan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili

Sumber: Dok. BPIW

Sebatik,” papar Rido. Ia menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR menerapkan metode pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan atau WPS dalam mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur PUPR. “Saya rasa program yang diajukan Pemkab Sambas cocok dengan yang dingkat BPIW. Sehingga, pengembangnya bisa sejalan,” tambah Rido yang disambut antusias jajaran Pemkab Sambas.

Pada tahun 2017, ungkap Rido, untuk Kabupaten Sambas ada program sektor Sumber Daya Air, antara lain, revitalisasi Danau Sebedang, peningkatan jaringan reklamasi Rawa Semelagi, peningkatan jaringan reklamasi Rawa Sebangkau, peningkatan jaringan reklamasi rawa Sarang Burung, peningkatan jaringan reklamasi rawa Sebusub, serta peningkatan jaringan reklamasi rawa Pemangkat, peningkatan jaringan reklamasi rawa Pimpinan, “Ada juga pembangunan sarana dan prasarana air baku Sambas, pemeliharaan

rutin di Pimpinan Komplek, pemeliharaan rutin di Sebangkau, pemeliharaan rutin di Sebawi, pemeliharaan berkala di Sebangkau, serta pemeliharaan berkala di Sebawi,” paparnya.

## Pemkab Sambas telah memiliki strategi pengembangan infrastruktur dan kawasan dengan memprioritaskan Lima kawasan strategis, yakni pengembangan Kawasan Wisata Temajuk, Kompleks Kesultanan Sambas, Kebun Raya Sambas, Kawasan Wisata Gunung Senujuh dan Rencana Pengembangan Bandar Udara Perintis di Kabupaten Sambas.

Untuk sektor jalan dan jembatan, pada 2017 ada pembangunan jalan Temajuk-Aruk, pemeliharaan rutin jalan Sambas-Singkawang-Sei Duri, pemeliharaan rutin

jembatan ruas Sambas-Singkawang-Sei Duri, pemeliharaan rutin jalan Temajuk-Merbau, pemeliharaan rutin jembatan ruas Temajuk-Merbau.

“Kemudian, pemeliharaan rutin jembatan ruas Simpang Tanjung-Galing, Pelebaran Jalan Galing-Tanjung, Tanjung-Aruk, pengadaan lahan pembangunan jalan batas Serawak-Aruk serta pelebaran jalan Simpang Tanjung-Aruk II,” jelasnya. Selain itu, lanjutnya, dari sektor Cipta Karya ada program fasilitasi pemanfaatan ruang terbuka public berupa pembangunan fisik. “Serta ada juga pengembangan jaringan air minum instalasi kota kecamatan (IKK) di Pemangkat Kab. Sambas,” tegasnya. [ris/infoBPIW](mailto:ris/infoBPIW)



# Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Infrastruktur KSPN Toraja



Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat mendampingi Komisi V DPR RI mengunjungi Tana Toraja

Sumber: Dok. BPIW

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja. Dukungan infrastruktur PUPR tersebut salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke KSPN tersebut.

“Dengan meningkatnya kunjungan

wisatawan ke KSPN Toraja, diharapkan dapat mendukung tercapainya target nasional berupa jumlah kunjungan turis asing 20 juta di tahun 2019,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat paparan dalam rapat “Pembahasan Infrastruktur Pendukung KSPN Toraja,” di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat

(17/2). Sebelumnya Rido Matari telah melakukan kunjungan ke Tana Toraja mendampingi Komisi V DPR RI pada 2 Februari lalu.

Pada rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Teknologi dan Budaya Maritim, Kemenko Maritim, S. Burhanuddin ini dihadiri juga, perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian





Kelautan dan Perikanan, Rido memaparkan, Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur dan wilayah dengan menerapkan metode berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokan dalam 35 WPS. KSPN Toraja sendiri masuk dalam WPS 27 yang wilayahnya meliputi Mamuju-Makale-Palopo-Kendari-Bau Bau-Wangi Wangi," jelasnya.

BPIW Kementerian PUPR, lanjutnya, telah membuat *masterplan* dan *development plan* pengembangan infrastruktur di WPS 27. Ia mengatakan, pada tahun 2017 ada sejumlah program pengembangan infrastruktur di wilayah sekitar KSPN Toraja, antara lain rekonstruksi Jalan Enrekang-Makale-Rantepao serta rehab jembatan PJN 2, penggantian jembatan S. Kalaena, pelebaran Jalan Rantepao Palopo, penggantian jembatan Pongmintu, dan pemeliharaan rutin jalan batas Sulbar-Makale- batas Kab. Luwu Selatan.

Ada juga penanganan longsoran Makale-Seseng, optimalisasi Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan jaringan perpipaan Sangalla di Kabupaten Tana Toraja. "Kemudian optimalisasi SPAM dan pembangunan jaringan perpipaan di Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Optimalisasi SPAM dan pembangunan jaringan perpipaan di Singki Kabupaten Toraja Utara," paparnya.

Selain itu, lanjut Rido, ada pembangunan

### Pada tahun 2017 ada sejumlah program pengembangan infrastruktur di wilayah sekitar KSPN Toraja, antara lain rekonstruksi Jalan Enrekang-Makale Rantepao serta rehab jembatan PJN 2

Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPS) Sampah di Kabupaten Toraja Utara. "Penyempurnaan jaringan air baku Malilin di Kabupaten Tana Toraja, pembangunan rumah susun sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Jalan Poros Ratenpao-Palopo Bolu, Kabupaten, Toraja Utara," terangnya.

Sementara itu, Perwakilan Kementerian

Perhubungan, M Yudi mengatakan, saat ini Bandara Pongtiku dinilai dapat dikembangkan untuk pesawat sejenis ATR 72. "Bandara tersebut dapat dikembangkan untuk penerbangan komersial agar dapat memotong waktu tempuh wisatawan menuju destinasi di kawasan KSPN," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Direktorat Bandar Udara akan melakukan kajian dengan melibatkan tenaga ahli dari beberapa perguruan tinggi untuk mengkaji Bandara Buntu Kunik.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Teknologi dan Budaya Maritim, Kemenko Maritim, S. Burhanuddin menyatakan, ke depan diharapkan ada pengembangan bandara untuk mendukung konektivitas menuju KSPN Toraja.

"Selain itu juga, perlu ada peningkatan frekuensi penerbangan menuju KSPN Toraja," imbuhnya. Kemudian, lanjutnya, dukungan atraksi pariwisata dan infrastruktur perlu terus dikembangkan. **(ris/infoBPIW)**





# Dukungan Infrastruktur PUPR untuk Pengembangan KSPN Borobudur

*Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur merupakan satu dari 10 KSPN prioritas yang pengembangannya didorong agar berjalan mengalami percepatan. Dalam mendukung percepatan pengembangan infrastruktur KSPN Borobudur, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta pembiayaan dari pinjaman Bank Dunia.*

*Dengan begitu, diharapkan pengembangan KSPN Borobudur akan berjalan cepat sesuai harapan, yakni dapat memberikan sumbangsih dalam pencapaian target jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 20 juta jiwa di tahun 2019.*



Pada tahun 2015 jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 10,4 juta jiwa. Dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, kesenian yang tersebar di seantero Tanah Air, tingkat kunjungan turis asing memiliki potensi untuk ditingkatkan.

Oleh karena itu, pemerintah menargetkan jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 20 juta jiwa di tahun 2019 mendatang. Untuk mencapai target tersebut pemerintah melakukan pengembangan infrastruktur terhadap 10 KSPN Prioritas, yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Dari 10 KSPN prioritas tersebut, Pemerintah memilih KSPN Borobudur, Danau Toba dan Mandalika untuk mendapat dukungan pembiayaan yang berasal dari pinjaman Bank Dunia. Sebab, 3 KSPN tersebut dinilai akan menjadi KSPN paling cepat yang memberikan timbal balik positif setelah dikembangkan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung dalam pengembangan infrastruktur di KSPN Borobudur. Dukungan infrastruktur PUPR tersebut salah satu bentuk upaya untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke KSPN tersebut.

"Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke KSPN Borobudur, diharapkan dapat tercapai target nasional berupa jumlah kunjungan turis asing 20 juta di tahun 2019," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat paparan Penyusunan *Integrated Masterplan for Priority*

*Destination* Danau Toba, Borobudur, dan Lombok di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Strategi dalam melakukan pengembangan infrastruktur di seluruh negeri, Kementerian PUPR kini menerapkan metode berbasis kewilayahan atau yang dikenal Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokan pada dalam 35 WPS," jelas Rido.

Saat ini Kementerian PUPR melalui BPIW telah membuat *masterplan* dan *development plan* untuk pengembangan infrastruktur dan wilayah di 35 WPS tersebut. Khusus KSPN Borobudur, Danau Toba dan Lombok, Kementerian PUPR menciptakan juga *Integrated Masterplan*, dimana untuk pengembangan infrastruktur dari *Integrated Masterplan* ini pembiayaannya bersumber dari pinjaman Bank Dunia.

Menurut Rido, pengembangan 3 KSPN prioritas sumber pembiayaannya dari APBN dan Bank Dunia. Dengan begitu, pengembangannya diharapkan dapat berjalan cepat.

Untuk pengembangan KSPN Borobudur melibatkan pengembangan di kawasan sekitar KSPN Borobudur, seperti Kabupaten Semarang, Kabupaten Salatiga, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, serta Kota Yogyakarta.

Program pengembangan yang melibatkan daerah di sekitar KSPN Borobudur, ungkap Rido, pada tahun 2017 dukungan dari APBN, antara

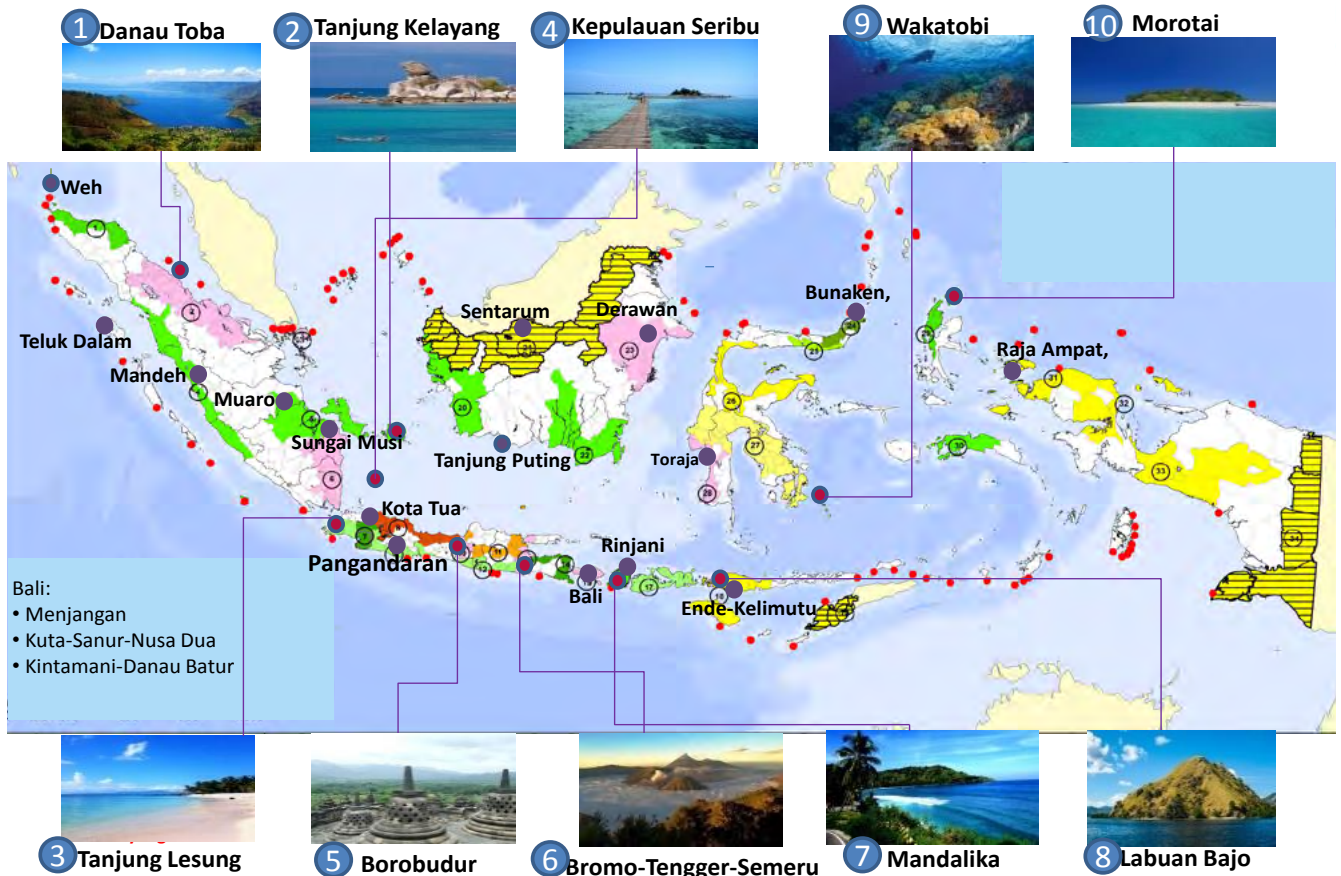
Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke KSPN Borobudur, diharapkan dapat tercapai target nasional berupa jumlah kunjungan turis asing 20 juta di tahun 2019," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan.



Borobudur merupakan destinasi wisata yang kini menjadi salah satu fokus yang dikembangkan pemerintah

Sumber: Dok. BPIW





Keterpaduan KSP Dalam WPS

lain pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Progo dan anak-anak sungainya di Kulon Progo.

Ada juga penyusunan Ruang Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Candi Mendut di Kabupaten Magelang (kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN dan penyusunan RTBL Kawasan Candi Pawon di Kabupaten Magelang). "Ada juga pembangunan sanitasi masyarakat atau Sanimas di Kota dan Kabupaten Magelang," terangnya.

Selain itu, ada pemeliharaan rutin Jalan Secang-Batas Kota Magelang, pemeliharaan rutin Jalan Ahmad Yani, Magelang, pemeliharaan rutin Jalan Soekarno-Hatta, Magelang, pemeliharaan rutin Jalan Batas Kota Magelang-Keprekan, pemeliharaan rutin Jalan Keprekan-BTS, Kota Muntilan, pemeliharaan rutin Jalan Pemuda, Kota Muntilan, pemeliharaan rutin Muntilan-Salam di Jalan Batas Yogyakarta serta Pemeliharaan rutin Keprekan-Borobudur. "Ada juga bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Magelang sebanyak 1.069 unit rumah," papar Rido.

Terkait dukungan dari Bank Dunia terhadap 3 KSPN, Rido menerangkan, saat ini telah memasuki tahap lelang untuk penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* Danau Toba-Borobudur-Lombok. Pinjaman Bank Dunia diharapkan dapat

efektif pada tahun 2018. Kendati begitu, Kementerian PUPR tetap memberikan dukungan untuk 3 destinasi pariwisata pada tahun 2017. Untuk KSPN Danau Toba dukungan infrastruktur PUPR yang diberikan mencakup 7 kabupaten di sekitar Danau Toba yakni, Kabupaten Simalungun, Kabupaten

di Kabupaten Karo. Pembangunan bendung dan jaringan daerah irigasi (DI) Sidlanitano, Kabupaten Tapanuli Utara. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Hutapaung Parmiahian Tahap I, Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk pembangunan pemeliharaan DI Sihorahora dan lainnya.

## Program pengembangan yang melibatkan daerah di sekitar KSPN Borobudur, ungkap Rido, pada tahun 2017 dukungan dari APBN, antara lain pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Progo dan anak-anak sungainya di Kulon Progo

Rido menerangkan, untuk KSPN Mandalika pengembangan infrastruktur melingkupi menyeluruh di Pulau Lombok. Seperti rencana rehabilitasi jaringan daerah irigasi (DI) Remeneng Kompleks Kabupaten Lombok, rehabilitasi jaringan irigasi DI Tanggik Kompleks Kabupaten Lombok Timur, pembangunan embung serbaguna Bangka Kabupaten Lombok Tengah dan lain-lain.

Di tempat yang sama, *Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness*, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengakui, rancangan TOR *Integrated Tourism Masterplan* yang telah dipaparkan BPIW sudah bagus. "Sepertinya tinggal mengakomodir sedikit masukan, pada prinsipnya rancangan yang ada telah lengkap," terangnya. **(ris/infoBPIW)**

Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Samosir.

"Antara lain, seperti pelebaran Jalan Ujung Aji-Batas Kota Kabanjahe, pelebaran Jalan Tol Medan-Kualanamu, preservasi dan pelebaran Jalan Siborongborong Tarutung-Batas Kota P. Sidempuan," terangnya. Ada juga pembangunan sanitasi masyarakat


**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR**  
**PENDUKUNG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN)**  
**BOROBUDUR**

**SKENARIO KONEKTIVITAS**

**KOTA SEMARANG**

-  Pelabuhan Tanjung Mas
  - Jumlah dermaga : 4 Unit
  - Luas area pelabuhan : 500 ha
  - Kegiatan : Transportasi orang & barang
-  Bandara : Ahmad Yani
  - Kelas : Pusat Penyebaran Skala Sekunder
  - Kapasitas : 1.782.453 penumpang /tahun
-  Stasiun Kereta Api : Poncol
  - Jumlah peron : 2
  - Jumlah jalur: 4
  - Kegiatan : Transportasi orang (kelas ekonomi ) & barang (peti kemas & semen)
-  Stasiun Kereta Api : Tawang
  - Jumlah peron : 3
  - Jumlah jalur: 6 jalur aktif
  - Kegiatan : Transportasi orang ( kelas ekonomi , bisnis & eksekutif )

**KAB. KLATEN**

-  Stasiun Kereta Api : Klaten
  - Jumlah peron : 3
  - Jumlah jalur: 6 jalur
  - Kegiatan : Transportasi orang (kelas ekonomi , bisnis & eksekutif )

**KOTA YOGYAKARTA**

-  Bandara : A di Sucipto
  - Kelas : Pusat Penyebaran Skala Sekunder
  - Kapasitas : 1,2 juta penumpang /tahun
-  Stasiun Kereta Api : Tugu Yogyakarta
  - Jumlah peron : 4 - Jumlah jalur: 8
  - Kegiatan : Transportasi orang (kelas , bisnis & eksekutif )
-  Stasiun Kereta Api : Tugu Yogyakarta
  - Jumlah peron : 4 - Jumlah jalur: 8
  - Kegiatan : Transportasi orang ( kelas , bisnis & eksekutif )

**KOTA SURAKARTA**

-  Bandara : A di Sumarmo
  - Kelas : Pusat Penyebaran Skala Sekunder
  - Kapasitas : 1.500.000 penumpang /tahun
-  Stasiun Kereta Api : Solo Jebres
  - Jumlah peron : 3 - Jumlah jalur: 7
  - Kegiatan : Transportasi orang (ekonomi )
-  Stasiun Kereta Api : Solo Balapan
  - Jumlah peron : 9 - Jumlah jalur: 12
  - Kegiatan : Transportasi orang ( kelas ekonomi , bisnis & eksekutif ) & barang (semen & angkutan BBM)



**OBJEK PARIWISATA**



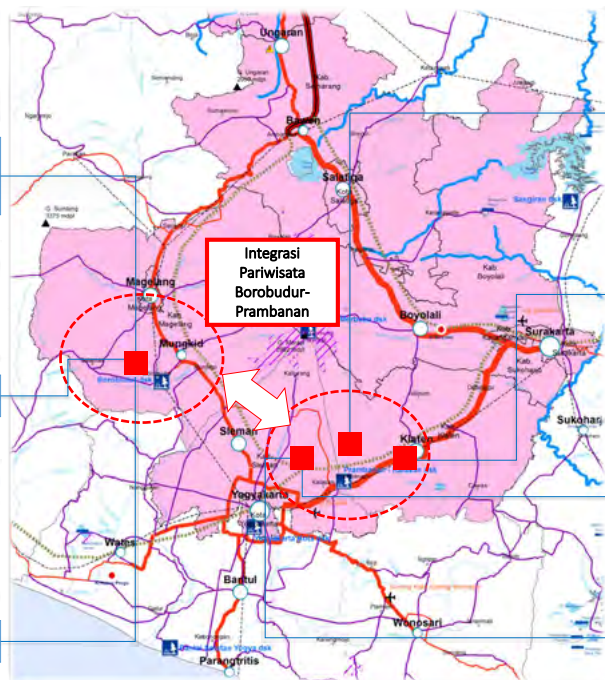
**Candi Borobudur**



**Candi Mendut**



**Candi Pawon**



**Candi Kalasan**



**Candi Plaosan**



**Candi Prambanan**



**Candi Sewu**

# Infrastruktur Berkelanjutan di Kawasan Perkotaan



**Melva Eryani Marpaung, ST, MUM**

*Kabag Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW*

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami perkembangan perkotaan yang ditandai dengan penambahan luas kawasan perkotaan. Perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non-pertanian akibat pembangunan atau urbanisasi, terjadi sangat cepat dan memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif terhadap perkotaan di Indonesia. Penurunan kualitas lingkungan merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan akibat tidak berfungsinya komponen-komponen lingkungan secara optimal. Selain itu, kualitas hidup masyarakat perkotaan juga menurun karena lingkungan perkotaan cenderung tidak layak huni.



Prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah diamanatkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 mengamanatkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan wajib diimplementasikan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sesuai dengan peran Kementerian PUPR, perlu adanya pengembangan infrastruktur dengan prinsip berkelanjutan untuk dapat mendukung amanat pemerintah tentang pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan infrastruktur dengan pendekatan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mencegah degradasi lingkungan, serta melindungi fungsi ekosistem alami kawasan perkotaan.

Infrastruktur berkelanjutan merupakan konsep pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keseimbangan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur berkelanjutan

perlu mengintegrasikan tiga aspek keberlanjutan, meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sumber daya. Keberlanjutan dari aspek ekonomi diharapkan dapat menjadi pembangkit kegiatan ekonomi sehingga kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi. Selain itu, keberlanjutan ekonomi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat meningkat.

Dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan, konsep lingkungan juga perlu diperhatikan untuk mencegah kerusakan lingkungan baik dalam skala lokal maupun global. Pembangunan infrastruktur dioptimalkan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan alam secara keseluruhan. Selanjutnya, keberlanjutan

dari aspek sumber daya perlu diintegrasikan dalam mewujudkan infrastruktur, mengingat pembangunan sebagian besar infrastruktur menggunakan energi yang tidak terbarukan. Ketersediaan sumber daya dimasa yang akan datang harus tetap terjaga sehingga penggunaannya harus dikelola secara optimal. Dengan demikian, infrastruktur berkelanjutan adalah prasarana alami dan buatan yang pengembangan atau pembangunannya memperhatikan aspek

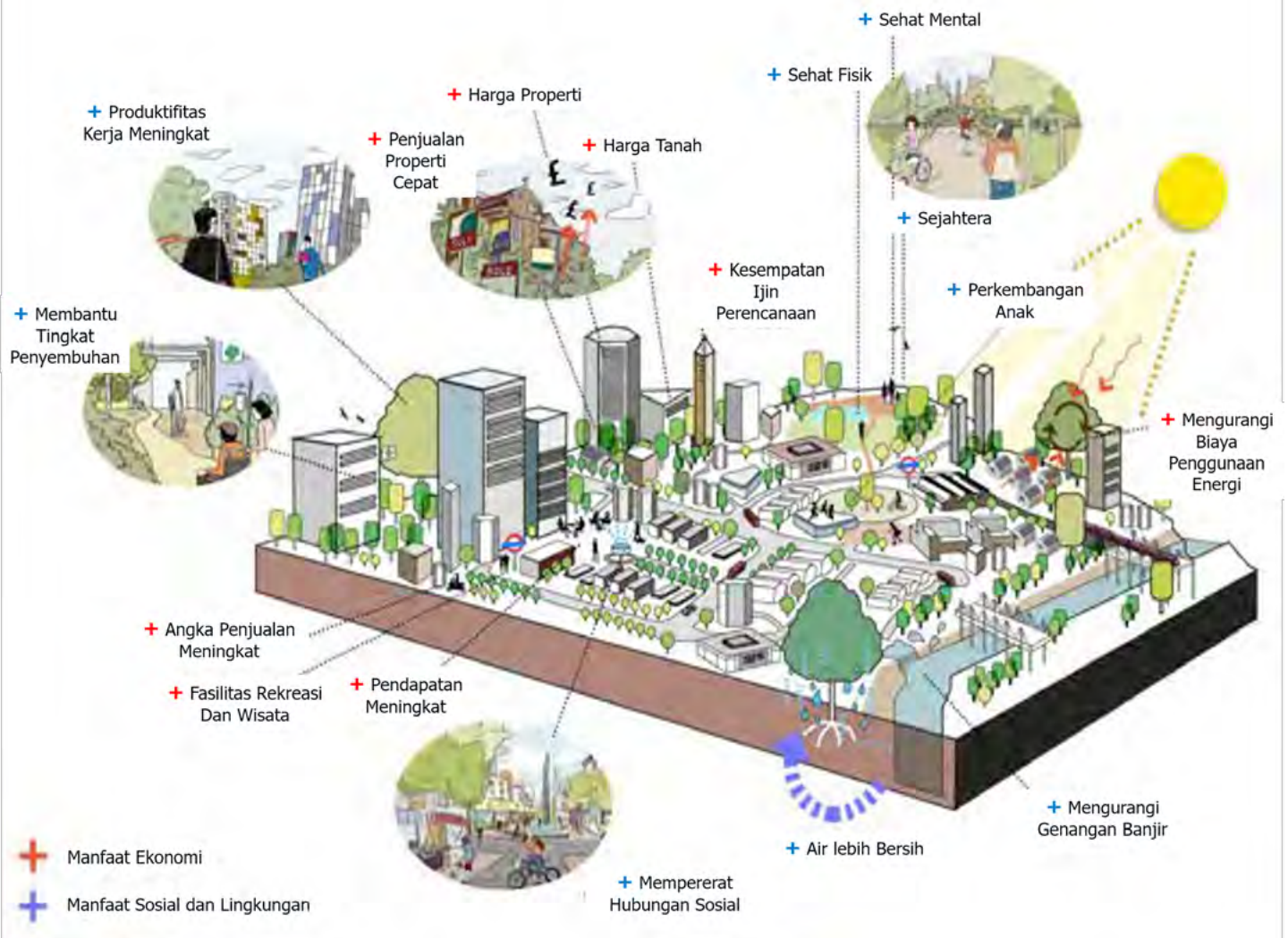
## Infrastruktur berkelanjutan adalah prasarana alami dan buatan yang pengembangan atau pembangunannya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan



berkelanjutan lingkungan, sehingga infrastruktur tersebut memiliki prinsip ramah lingkungan, untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk itu, acuan atau pedoman terkait pengembangan infrastruktur berkelanjutan menjadi penting sebagai acuan untuk pengembangan infrastruktur, khususnya di kawasan perkotaan.

khususnya infrastruktur bidang PUPR.

Infrastruktur berkelanjutan merupakan salah satu alat untuk mencapai keberhasilan pembangunan kota berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut memiliki berbagai manfaat mulai dari aspek lingkungan, masyarakat/sosial, hingga aspek ekonomi. Oleh karena



Gambar : Peran/Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan pada Infrastruktur yang Berkelanjutan di Perkotaan

## Pedoman Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan di Kawasan Perkotaan

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan saat ini telah menyusun Konsep Pedoman Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan di Kawasan Perkotaan yang merupakan acuan atau arahan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perwujudan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Adapun tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan keterpaduan pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang mampu menciptakan harmonisasi antara infrastruktur alami, infrastruktur buatan, dan ekologi. Konsep Pedoman ini memuat peran dan kriteria infrastruktur berkelanjutan,

itu infrastruktur berkelanjutan harus direncanakan, dirancang, dan dipelihara dengan baik, serta diintegrasikan pada perencanaan di tingkat lokal dan nasional agar infrastruktur dapat bermanfaat secara optimal.

Kota berkelanjutan adalah kawasan perkotaan yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, lingkungan terbangun, serta lingkungan sosial. Dengan kata lain, kota berkelanjutan adalah kota yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Pencapaian keberlanjutan kota diyakini dapat tercapai dengan mengintegrasikan pilar-pilar utama kota berkelanjutan.



Menurut *United Nations Department of Economic and Social Affairs* dan *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, terdapat 4 pilar utama kota berkelanjutan, yaitu bina sosial, pengembangan ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan dan perkotaan (Gambar 2)



Gambar : Pilar Utama Kota Berkelanjutan

### Komponen Infrastruktur Berkelanjutan (Hijau)

Untuk dapat melakukan pengembangan infrastruktur berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan kota, komponen masing-masing infrastruktur telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bidang PUPR, khususnya infrastruktur ramah lingkungan.

Komponen infrastruktur dapat berupa *grey infrastructure* atau *green infrastructure* yang lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen infrastruktur permukiman meliputi antara lain bangunan hijau dan ruang terbuka hijau;
2. Komponen infrastruktur drainase meliputi saluran drainase, kolam retensi, waduk resapan, sumur resapan, bioretensi, dan biopori;
3. Komponen infrastruktur sumber daya air meliputi bendung, embung, waduk/danau, rawa, dan laguna;
4. Komponen infrastruktur sanitasi meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPS);
5. Komponen infrastruktur jalan meliputi jaringan jalan, jalur pejalan kaki, jalur khusus sepeda, dan perabot jalan.

Jenis dan komponen infrastruktur berkelanjutan bidang PUPR lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 3



Gambar: Jenis dan Komponen Infrastruktur Berkelanjutan

Pemanfaatan komponen dan jenis infrastruktur berkelanjutan di kawasan perkotaan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. fungsi utama infrastruktur berkelanjutan;
- b. kriteria penyediaan infrastruktur berkelanjutan;
- c. konsep, teknik, dan tata cara perencanaan infrastruktur berkelanjutan; dan
- d. skala pelayanan kawasan perkotaan dalam rencana tata ruang wilayah.

Infrastruktur berkelanjutan memiliki tujuan untuk membuat keseimbangan dan keberlanjutan dari suatu kawasan perkotaan. Dengan penerapan infrastruktur berkelanjutan diharapkan akan diperoleh beberapa manfaat dan peran penting dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Perencanaan infrastruktur berkelanjutan di kawasan perkotaan dapat dilakukan berdasarkan tahapan perkembangan kota, yang terdiri atas kawasan telah berkembang; kawasan sedang berkembang; dan kawasan perkembangan baru.

Identifikasi kawasan dilakukan khususnya pada kawasan yang sedang berkembang dan kawasan telah berkembang untuk mendapatkan gambaran terhadap kawasan yang perlu dilindungi, sehingga infrastruktur yang direncanakan dapat memberikan manfaat yang optimal. Identifikasi kawasan yang perlu dilindungi dapat dilakukan dengan cara menentukan dasar pertimbangan ataupun kriteria kawasan yang perlu diperhatikan pengembangannya/dilindungi;



menetapkan kriteria berdasarkan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan; melakukan identifikasi terhadap kawasan yang perlu diperhatikan pengembangannya/dilindungi berdasarkan kriteria yang telah disepakati; menetapkan komponen dan jenis infrastruktur berkelanjutan yang akan dikembangkan pada kawasan tersebut; serta menetapkan metode penyediaan infrastruktur berkelanjutan pada kawasan tersebut.



Gambar 4. Konsep Integrasi antara Sungai dan Taman

Identifikasi ketersediaan infrastruktur baik infrastruktur konvensional maupun infrastruktur berkelanjutan perlu dilakukan, untuk mengetahui profil infrastruktur pada kawasan perkotaan. Penyediaan infrastruktur berkelanjutan perlu dilakukan khususnya di kawasan pengembangan baru, sedangkan pada kawasan sedang berkembang dan sudah berkembang perlu dilakukan identifikasi lebih rinci berdasarkan teknik perencanaan infrastruktur, sehingga dapat diketahui infrastruktur yang memerlukan preservasi, konservasi, atau revitalisasi. Identifikasi dan penetapan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan dapat mempermudah proses pengembangan infrastruktur yang terintegrasi antar komponen. Adapun, pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut antara lain pemerintah pusat; pemerintah daerah tingkat provinsi; pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota; dan masyarakat.

Adapun dalam rangka penyediaan infrastruktur berkelanjutan perkotaan perlu dilakukan kesepakatan antar pemangku kepentingan agar infrastruktur yang dikembangkan dapat terintegrasi. Penetapan melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan wajib

dilakukan dalam mengembangkan infrastruktur pada kawasan telah berkembang, kawasan sedang berkembang, dan kawasan pengembangan baru. Selain itu, terkait penyusunan perencanaan detail teknis infrastruktur berkelanjutan, agar dilakukan dengan memperhatikan kondisi kawasan perkotaan, dengan komponen-komponen teknis antara lain desain teknis bangunan; ukuran bangunan; volume bahan bangunan; dan komponen teknis lain yang sesuai.

Akhirnya, kedudukan pedoman ini nantinya merupakan pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan infrastruktur sektor PUPR dan sektor lainnya, termasuk juga bidang penataan ruang. Pedoman ini nantinya berfungsi sebagai acuan dalam mewujudkan infrastruktur berkelanjutan sesuai dengan rencana pengembangan infrastruktur dalam konteks kewilayahan/kawasan dan sesuai dengan panduan atau petunjuk teknis pembangunan infrastruktur lainnya, serta diharapkan dapat mewujudkan

keterpaduan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan perkotaan; meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur berkelanjutan di kawasan perkotaan; dan meningkatkan reputasi investasi atau bisnis dari kawasan perkotaan tersebut bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam perwujudan infrastruktur bidang PUPR yang berkelanjutan.

# Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

## BANG EGI



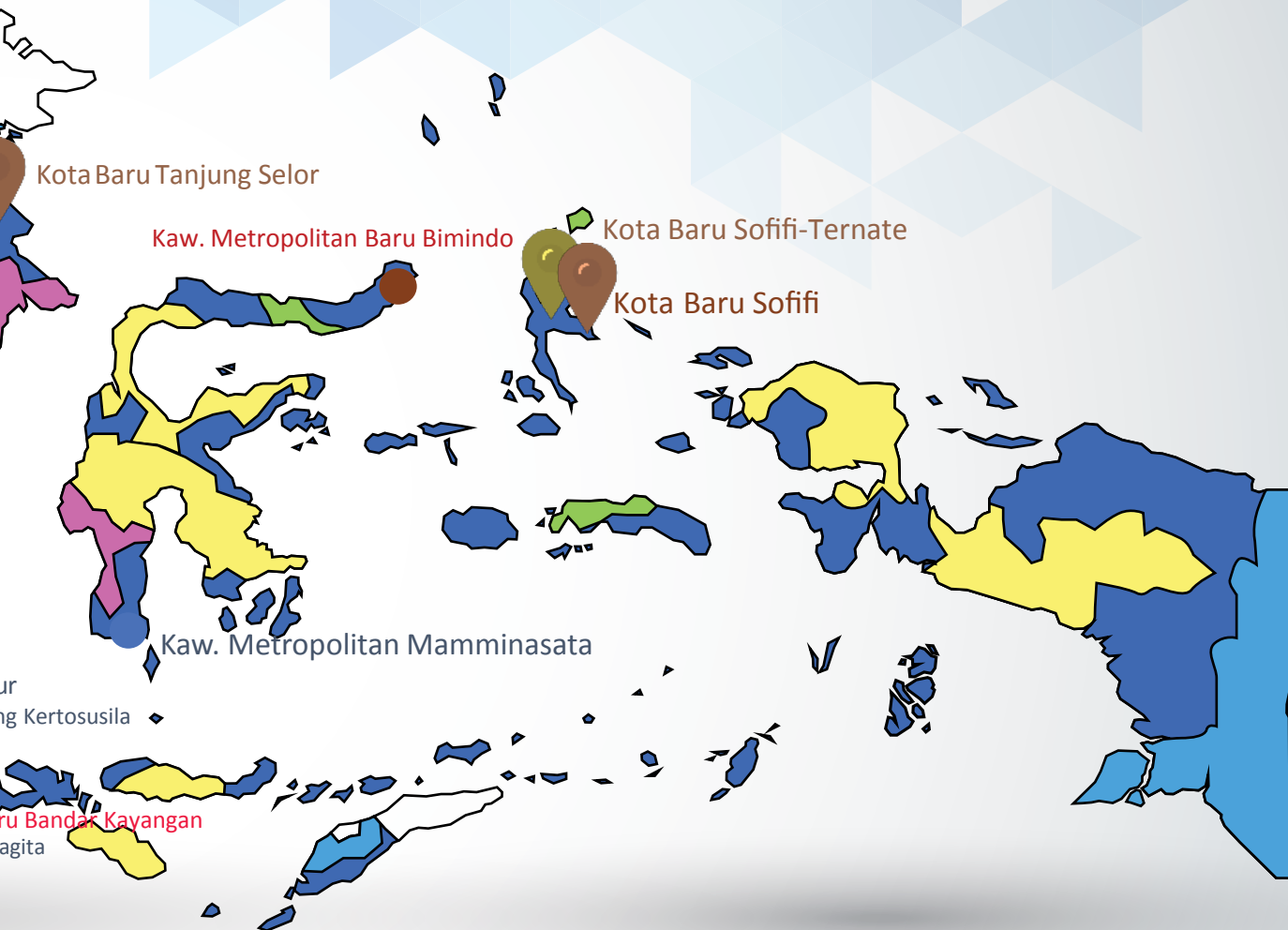
# MP & DP PENGEMBANGA







Salah satu produk *masterplan* dan *developmen plan* yang dihasilkan BPIW adalah Pengembangan Kawasan Perkotaan. Ada 22 *masterplan* dan *masterplan* dan *developmen plan* Kawasan Perkotaan yang dihasilkan. Selain itu ada 8 *Feasibility Study* (FS) dan Pra Desain Kawasan Perkotaan. Berikut peta sebaran *masterplan* dan *developmen plan* tersebut tahun 2015 dan 2016.





# N KAWASAN PERKOTAAN



 Kota Baru Tahun 2015  
 Kota Baru Tahun 2016

 Kota Besar Tahun 2015  
 Kota Besar Tahun 2016

 Kawasan Metropolitan 2015  
 Kawasan Metropolitan 2016

MP/DP (Indikasi Program)  
 60 Kota Otonom  
 70 PKN/PKW

8 FS dan Pra Desain  
 7 Kawasan Metropolitan  
 1 Kawasan Perkotaan



# Wisata Sejarah Di Bumi Paris Van Java

Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki beberapa destinasi pariwisata yang cukup menarik. Berbagai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan, taman, dan tol juga berhasil menarik hati para wisatawan yang datang mengunjungi Kota Kembang ini.

Apalagi Januari lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan jembatan layang Antapani atau *Overpass* Antapani Bandung, Jawa Barat. Jembatan ini tergolong istimewa, karena berteknologi baru dengan

struktur baja bergelombang dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Teknologi tersebut merupakan buah karya Balitbang Kementerian PUPR.

Tidak hanya itu, Kota Bandung memiliki berbagai destinasi pariwisata yang berhasil menarik para wisatawan domestik maupun

mancanegara. Tidak hanya destinasi wisata modern dan alami, Bandung juga memiliki destinasi wisata yang bernilai sejarah. Ada beberapa tempat wisata sejarah yang bisa dikunjungi di kota Bandung. Pertama, Jalan Asia Afrika. Jalan tersebut merupakan jalan tertua dan sangat bersejarah dalam

---

*Kota Bandung memiliki berbagai destinasi pariwisata yang berhasil menarik para wisatawan domestik maupun mancanegara. Tidak hanya destinasi wisata modern dan alami, Bandung juga memiliki destinasi wisata yang bernilai sejarah*

---

pembentukan kota Bandung. Bangunan yang sangat dikenal sebagai salah satu tempat Konferensi Asia Afrika Bandung ini dikenal dengan Gedung Merdeka.

Di sepanjang jalan ini terdapat berbagai macam desain dan kisah catatan sejarah. Konon kawasan jalan ini dibuat pada saat

pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Kota Bandung. Sejak itulah pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan besar-besaran di Bandung. Pada saat itu gaya bangunan arsitektur *Art Deco*, menjadi yang cukup populer dibuat

Belanda. Hal ini pula yang menjadi salah satu sebab, mengapa kota Bandung dikenal dengan sebutan Paris Van Java.

Kedua, Jalan Braga. Jalan tersebut merupakan salah satu jalan yang sangat bersejarah di kota Bandung. Jalan ini cukup dikenal sejak jaman

pemerintahan Hindia-Belanda. Sebagai tempat yang menyimpan sejarah Kota Kembang, jalan Braga ini tempat yang masih dipertahankan dan bahkan menjadi maskot kota Bandung. Sejumlah bangunan tua masih tetap berdiri dengan kokoh di kanan-kiri jalan. Selain dapat berwisata sejarah, di





jalan ini juga bisa menjumpai sejumlah toko yang menjual berbagai pernik-pernik khas kota Bandung. Ada juga terdapat jajaran restoran dan cafe yang bisa dikunjungi untuk berwisata kuliner. Jalan Braga Bandung sekarang dengan dahulu jelas sangat berbeda, terutama infrastruktur berupa bangunan serta kehidupan masyarakatnya. Di sekitar kawasan jalan Braga terdapat pula tempat-tempat menarik lainnya untuk dikunjungi seperti Gedung Merdeka Bandung, alun-alun kota Bandung, dan tempat-tempat menarik lainnya.

Ketiga, Penjara Soekarno (Sel Banceuy). Penjara Banceuy, merupakan salah satu tempat, dimana Presiden RI pertama, Bung Karno diasingkan di Kota Bandung. Lokasinya berada di dalam kompleks pertokoan Banceuy, yang dibangun pada tahun 1877 oleh pemerintah Belanda. Dalam penjara yang sangat sempit inilah Bung Karno menyusun pidato pembelaan yang dikenal dengan nama "Indonesia Menggugat". Di penjara ini masih tersimpan benda-benda

yang pernah digunakan Bung Karno seperti papan untuk tidur, bantal dari karung goni, selimut pispot, dan penerangan seadanya. Saat ini Penjara Banceuy dihiasi kalimat ungkapan Bung Karno "Koe Korbankan Dirikoe di Penjara ini Demi Bangsa dan

Negaraku Indonesia". Gambar Soekarno dalam ukuran besar untuk mengingat jasanya juga terpampang di dinding bersama ukuran Garuda dan Teks Pancasila.

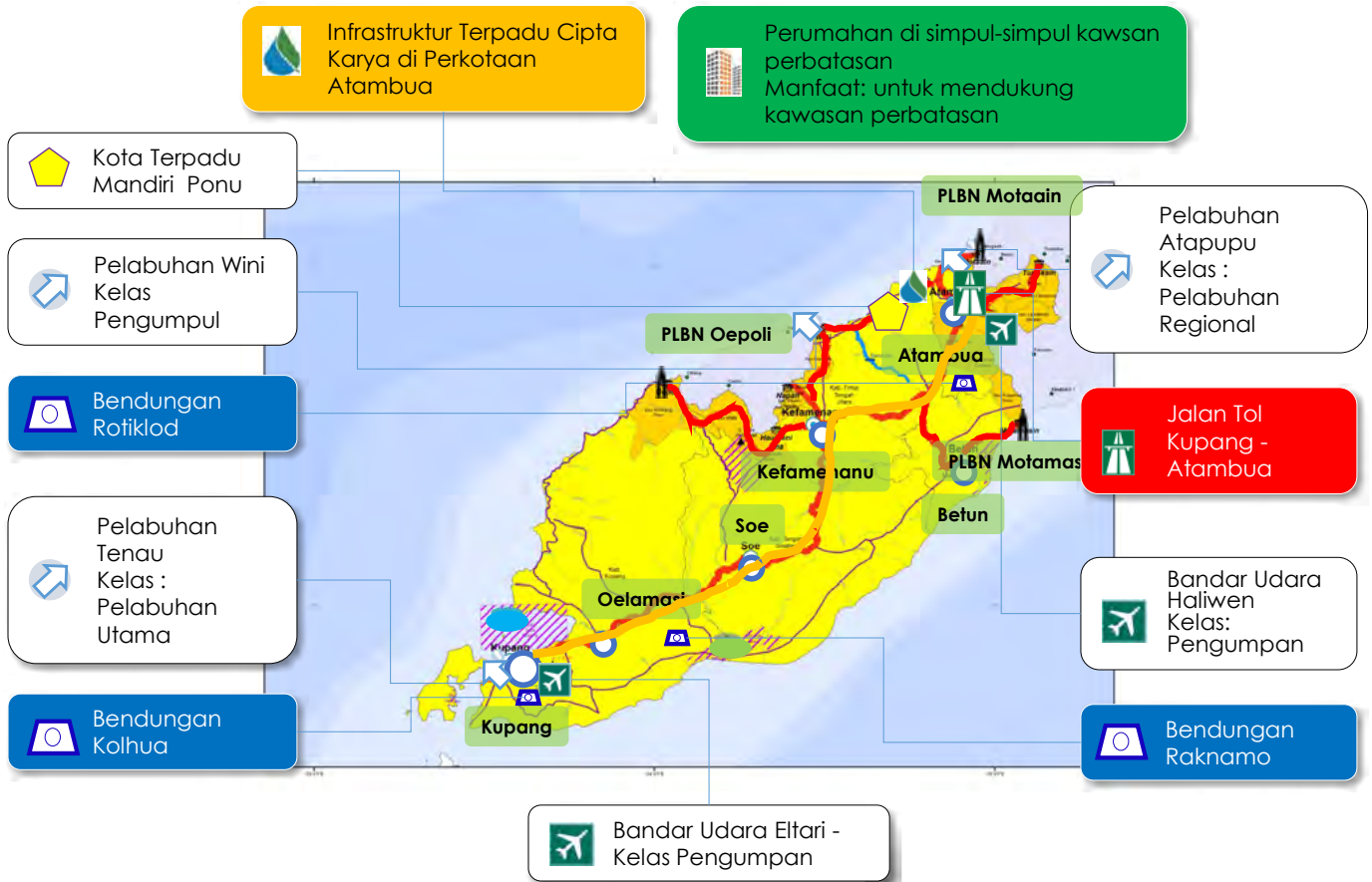


Sumber: istimewa



# Wilayah Pengembangan Strategis 19 Kupang - Atambua

## ULTIMATE WPS 19 KUPANG – ATAMBUA 2025



### Ultimate

Arah pembangunan pada Wilayah Pengembangan Strategis Kupang - Atambua (WPS 19) adalah pembangunan infrastruktur berupa Jalan Tol Kupang - Atambua yang menjadi tulang punggung WPS 19 yang mendukung Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu sekaligus menjadi akses menuju ke Bandar Udara Haliwen (Kelas Pengumpan) dan Bandar Udara Eltari (Kelas Pengumpan), serta beberapa pelabuhan yang terdapat pada WPS 19 yaitu Pelabuhan Atapupu (Kelas Pelabuhan Regional), Pelabuhan Wini (Kelas Pengumpul) dan Pelabuhan Tenau (Kelas Pelabuhan Utama). Selain jalan tol, arah pembangunan pada WPS 19 dari sektor Cipta Karya adalah terwujudnya infrastruktur terpadu Cipta Karya di perkotaan Atambua, dari sektor Sumber Daya Air adalah dibangun tiga bendungan baru yaitu Bendungan Rotiklod, Bendungan Kolhua dan Bendungan Raknamo, dan dari sektor Penyediaan Perumahan terdapat pembangunan perumahan di simpul-simpul kawasan perbatasan untuk mendukung kawasan perbatasan di Kupang - Atambua.

### Program Utama

Program utama pada Wilayah Pengembangan Strategis Kupang - Atambua (WPS 19) sektor Sumber Daya Air terdapat konstruksi pembangunan Embung Irigasi di Kabupaten Kupang, pembangunan Mebung Irigasi Oematnunu tahap II, lanjutan pembangunan Bendungan Kolhua Kota Kupang dan pembangunan Bendungan Raknamo Kota Kupang. Dari sektor Bina Marga, terdapat pembangunan jalan perbatasan dari Kefamenanu menuju Oepoli, pembangunan jalan perbatasan Atambua - Waeluli dan pelebaran jalan Sp. Nurobo sampai dengan Sp Umasukaer dan Sp. Motamasin. Dari sektor Penyediaan Perumahan, terdapat pembangunan rusunawa, pembangunan PSU Primer permukiman dalam skala besar, pembangunan Rumah Khusus Perbatasan dan pembanguana Rumah Khusus. Terkait dengan sektor Cipta Karya, terdapat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R di Kabupaten Belu, pembangunan SPAM di kawasan perbatasan di Molas Oan Kabupaten Belu dan pembanguana instalasi pengolahan air limbah di Kabupaten Belu.

# Wilayah Pengembangan Strategis 20 Ketapang - Pontianak - Singkawang - Sambas

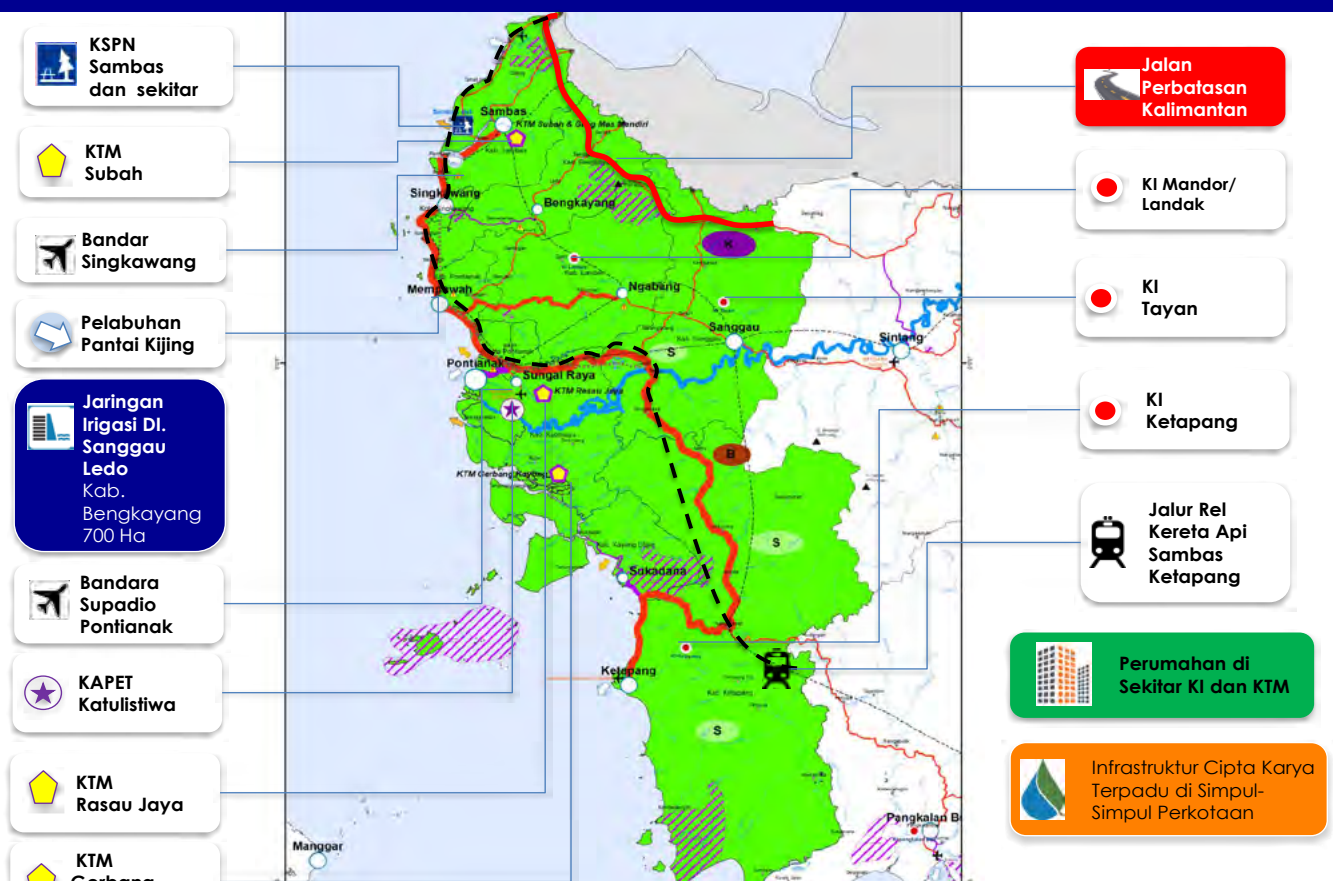
## Ultimate:

Pembangunan infrastruktur PUPR sampai dengan tahun 2025 di WPS 20 (Ketapang - Pontianak - Singkawang - Sambas) diantaranya adalah pembangunan jalan perbatasan kalimantan, pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional sambas dan sekitarnya, Pembangunan kawasan industri landak, kawasan industri Tayan, dan kawasan industri ketapang. Selain pembangunan kawasan industri, WPS 20 juga melakukan pembangunan bandara singkawang, bandara supadio pontianak, Selain itu Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Subah, kota terpadu mandiri rasau jaya, dan kota terpadu mandiri gerbang kayong. Pembangunan pelabuhan pantai kijang, pembangunan jaringan irigasi DL sanggau, ledo kab bengkayang seluas 700 hektare. Pembangunan jalur rel kereta api sambas ketapang, pembangunan perumahan di sekitar kawasan industri dan Kawasan Terpadu Mandiri, pembangunan kapet katulistiwa, pembangunan perumahan di sekitar Kawasan Industri dan Kawasan Terpadu Mandiri, dan juga pembangunan cipta karya terpadu di simpul-simpul perkotaan.

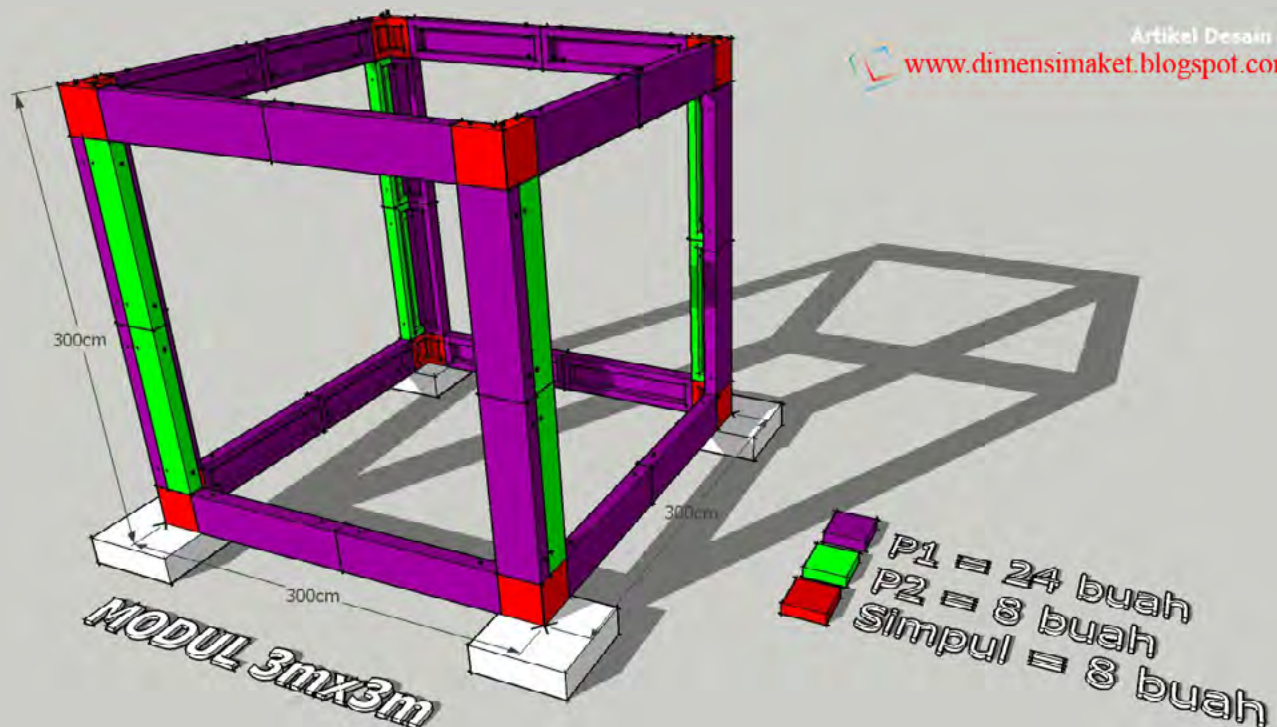
## Program Utama:

Pada program utama wps 20 (Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas), pembangunannya terdiri dari pembangunan pemecah gelombang pantai, pasir panjang, singkawang. Pembangunan *break water* pelabuhan pantai kijang mempawah, pembangunan intake air baku di sungai ambawang mempawah, pembangunan *intake* air baku di ketapang, pembangunan jaringan irigasi di sungai leda. Selain pembangunan tersebut program utama pembangunan di WPS 20 ini diutamakan juga pembangunan jalan menuju terminal ALBN di singkawang, sintang, ketapang, pembangunan jalan kawasan industri Mandor-Jalan nasional sepanjang 9 kilometer. Selain itu juga dilakukan peningkatan jalan Mandor-Ngarak dan peningkatan jalan dua jalur dalam Kota Ngabang (jalan nasional ruas sidas-tanjung sta. 168+000 - sta. 186+000). Kemudian dilakukan juga pembangunan rumah umum tapak layak huni Kab. Mempawah, pembangunan IPAL Komunak di Ngabang, pembangunan SPAM pelabuhan pantai Kijing, dan pembangunan rumah susun perkotaan di Kawasan Industri Mandor (Landak).

## ULTIMATE WPS 20 KETAPANG SAMBAS TAHUN 2025



# RISHA, Teknologi Bangunan Rumah Seperti LEGO



Modul Struktur Bangunan RISHA

RISHA, singkatan dari Rumah Instan Sederhana Sehat, adalah suatu teknologi konstruksi sistem pracetak untuk bangunan sederhana. Ditemukan dan dikembangkan oleh Puslitbang Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Konsep RISHA, seperti halnya permainan LEGO, menggunakan sistem bongkar-pasang atau knockdown dari komponen-komponen modular yang dibuat secara fabrikasi.

RISHA merupakan rumah layak huni dan terjangkau dapat dibangun secara bertahap berdasarkan modul, dengan waktu yang diperlukan dalam proses pembangunan setiap modul 24 jam oleh tiga pekerja. Karena ukuran komponen mengacu pada ukuran modular maka komponennya memiliki sifat fleksibel dan efisien dalam konsumsi bahan bangunan. Telah memiliki 67 aplikator dan diterapkan sebanyak + 10.000 unit di Aceh paska Tsunami.

Modul RISHA terdiri dari 2 tipe Panel Struktur dan 1 Struktur Simpul. Panel Struktur berdimensi maksimal 120 cm x 30 cm dengan tebal

komponen 10cm. Dari modul struktur pembentuknya, maka ukuran ruang yang terbentuk adalah perpaduan dari ukuran 120 cm dan 30 cm (1,8 m ; 3 m; 4,2 m; dan untuk selanjutnya kelipatan 30cm). Simpul sebagai komponen penyambung pada sisi dan sudut ruang, sedangkan Panel Struktur P1 & P2 sebagai lengan struktur yang berfungsi sebagai sloof, kolom dan balok. Semua komponen RISHA dirakit dan dihubungkan dengan menggunakan sistem baut dan plat melalui lubang-lubang di setiap komponennya. Jenis baut yang digunakan adalah baut galvanis 14 mm. Komponen-komponen yang tidak dapat duhubungkan langsung oleh baut, bisa menggunakan sistem kancing menggunakan plat baja galvanis dengan tebal minimal 3 mm.

Untuk sistem pengisi dinding tidak berbeda dengan bangunan umumnya. Sistem struktur RISHA fleksibel sesuai kebutuhan dan selera pemilik. Apakah ingin menggunakan dinding bata, partisi dari kayu atau multiplek, gipsum, kalsiboard atau lainnya.





Model Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yang merupakan teknologi konstruksi sistem pracetak untuk bangunan sederhana

### Implementasi Desain

Sistem struktur RISHA menggunakan sistem modul yang terbentuk dari rakitan komponen-komponennya. Sehingga ruang-ruang yang terbentuk nantinya akan berdimensi sesuai keterbatasan modul komponen pembentuknya. Dengan kata lain, pilihan menggunakan Struktur RISHA harus ditentukan di awal, sebelum proses desain. Karena desain untuk bangunan pada umumnya, belum tentu bisa diterapkan dengan konsep RISHA. Misalnya: desain dengan rancangan ruang berdimensi 4m x 5m tidak bisa menggunakan struktur RISHA. Karena dari modul struktur pembentuknya, maka ukuran ruang yang terbentuk adalah perpaduan dari ukuran 120 cm dan 30 cm (1,8 m ; 3 m; 4,2 m). Tentunya hal ini bisa di siasati dengan desain yang baik di awal perencanaan.

### Keunggulan & Kekurangan

RISHA memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan dalam pembangunannya. Adapun untuk keunggulan dari RISHA yaitu:

- Menggunakan sistem bongkar pasang (knockdown), sehingga mampu mengakomodasi konsep rumah tumbuh (membangun rumah secara bertahap)
- Pembangunan Struktur RISHA dapat dilakukan dalam waktu singkat, karena tidak memerlukan pengecoran. Semua sambungan

komponennya menggunakan baut dan plat galvanis, sehingga menekan biaya konstruksi.

- Menggunakan Pondasi Setempat. Hanya pada titik-titik tumpuan, sehingga menghemat biaya bahan & konstruksi.
  - Struktur RISHA telah di uji terhadap resiko gempa sampai dengan zona 6
  - RISHA dapat dibangun di berbagai jenis lahan, tentunya dengan pondasi menyesuaikan dengan kondisi lahan yang ada.
- Sedangkan kekurangan dari RISHA adalah kurang fleksibel terhadap desain karena keterbatasan modul komponennya dan pembangunannya terbatas sampai konstruksi rumah 2 lantai saja.

**Sumber:** <http://puskim.pu.go.id/risha-rumah-instan-sederhana-sehat/>

Sistem struktur RISHA menggunakan sistem modul yang terbentuk dari rakitan komponen-komponennya. Sehingga ruang-ruang yang terbentuk nantinya akan berdimensi sesuai keterbatasan modul komponen pembentuknya



# Hari Sampah Nasional

Dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional, Kementerian PUPR menggelar kerja bakti. Seluruh pimpinan dan staf BPIW juga ikut melakukan kerja bakti di sekitar gedung BPIW, 24 Februari lalu. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut



Kebersamaan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dengan para staf disela-sela kegiatan kerja bakti.



Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan turut memencet tombol dimulainya kerja bakti bersama pejabat di Kementerian PUPR



Bersama para staf, Rido Matari Ichwan melakukan pembersihan



Bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar BPIW



# Kunjungan Tana Toraja

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan beserta jajarannya melakukan kunjungan ke Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Berikut potret kegiatannya :



Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat tiba di Tana Toraja



Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mendapat penjelasan seputar rencana percepatan pengembangan



ombongan BPIW berdiskusi dengan pejabat terkait



Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan memberikan arahan di lapangan



# Sarana Kantor BPIW Responsif Gender



Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak misalnya bai terhadap perempuan maupun laki-laki. Dengan adanya diskriminasi dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Isu gender ini juga menyangkut sarana atau fasilitas yang digunakan pada sebuah infrastruktur seperti jalan, gedung, dan lain-lain. Disisi lain, pembangunan infrastruktur sangat penting bagi masyarakat baik untuk mobilitas dan kebutuhan hidup. Namun, infrastruktur akan lebih bermanfaat dan berguna jika semua masyarakat dapat memanfaatkannya, tanpa memandang gender. Banyak orang menafsirkan 'gender' sebagai laki-laki dan perempuan. Padahal, gender atau pengarusutamaan gender di sini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan fasilitas untuk laki-laki, perempuan dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus fisik dan *disable*.

Pengarusutamaan gender dalam mendukung infrastruktur dimaksud adalah infrastruktur yang memperhatikan keamanan, kenyamanan dan kemudahan semua masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sangat memperhatikan pengarusutamaan gender ini. Hal ini sangat mudah ditemukan di Gedung G, yang merupakan kantor dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan juga Ditjen Penyediaan Perumahan.

Dekat pintu depan gedung, terlihat jalur khusus bagi penyandang kebutuhan khusus. Kemudian di lantai 1 gedung G ini juga tersedia nursery room atau ruangan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Ruangan itu cukup nyaman dengan fasilitas berupa AC, kursi yang nyaman, karpet yang indah, wastafel, dan kulkas. Dinding ruangan dihiasi dengan gambar-gambar kartun yang disenangi anak-anak.

Tidak hanya itu, dari 3 lift yang ada di gedung tersebut, tersedia 1 lift khusus untuk yang berkebutuhan khusus. Dibagian depan lift terlihat gambar kursi roda. Kemudian pada bagian dalam lift ada fasilitas lempengan besi memanjang di 2 disisi, yang dapat berfungsi sebagai pegangan bagi penggunanya.

Penyediaan fasilitas bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus ini merupakan bagian dari langkah Kementerian PUPR dari pelaksanaan konvensi internasional yang telah diratifikasi, antara lain konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yakni *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan kesepakatan berdasarkan hukum internasional yang melindungi hak-hak perempuan dalam semua sektor kehidupan. Konvensi ini bertujuan

menyingkirkan segala bentuk diskriminasi perempuan.

Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, pada pasal 2 disebutkan bahwa Pedoman Teknis ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum itu disebutkan bahwa untuk wastafel harus memenuhi persyaratan yang sangat responsif gender, dimana memudahkan bagi para pengguna kursi roda. Dalam lampiran itu disebutkan bahwa wastafel harus dipasang sedemikian sehingga tinggi permukaannya dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda dengan baik. Kemudian wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda. Selain itu pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi roda. Aturan ini telah diterapkan gedung BPIW. Dengan demikian BPIW telah menerapkan penyediaan sarana infrastruktur yang responsif terhadap penyandang kebutuhan khusus atau memperhatikan masalah gender.





## TIPS MENJAGA KESEHATAN TUBUH SAAT SERING LEMBUR BEKERJA

Banyak orang terjebak pada rutinitas kerja hingga melupakan dirinya. Tenaga, pikiran semua dicurahkan untuk mendedikasikan diri pada pekerjaan dan kerap lembur, namun tidak sadar dampaknya akan sangat buruk bagi kehidupannya di masa depan. Sesibuk apapun, anda harus tetap meluangkan waktu untuk tetap melakukan aktifitas fisik yang cukup, agar kesehatan tetap terjaga. Bahkan jika Anda kerap bekerja lembur selama lebih dari 12 jam sehari, membuat perubahan kecil dalam kegiatan sehari-hari dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, baik secara fisik dan mental. Anda tidak harus membuat perubahan gaya hidup total dalam satu atau dua hari, sebuah perubahan kecil setiap hari dapat membantu Anda membuat perubahan besar.

Berikut 7 tips yang dapat membantu Anda tetap sehat serta memiliki karier yang sukses, seperti dikutip dari <http://lifestyle.liputan6.com/> :

### 1. Banyak jalan

Anda harus rutin berjalan dalam rutinitas

sehari-hari. Berjalan saat Anda menerima telepon, berjalan menuju parkir mobil Anda, memilih naik tangga ketimbang lift, dan kegiatan lainnya. Jadi, tak ada alasan lagi Anda tidak bergerak sepanjang hari.

### 2. Paparan sinar matahari

Pergi berjemur di bawah sinar matahari pagi merupakan hal yang sangat baik. Biarkan sinar matahari pagi memberikan asupan vitamin D secara alami yang baik bagi tubuh.

### 3. Makan buah

Satu apel sehari dapat menghindarkan tubuh dari penyakit. Saatnya untuk hidup sehat. Buah apel memiliki vitamin dan nutrisi yang cukup lengkap. Kombinasikan apel hijau dan apel merah setiap hari. Apel juga dapat mengenyangkan perut sebagai snack di sore hari.

### 4. Berhenti merokok

Efek berbahaya dari merokok dan zat karsinogen yang ada pada tubuh harus kita perhatikan. Terutama untuk Anda yang kerap bekerja hingga larut malam. Usahakan Anda segera menghentikan kebiasaan merokok sebelum Anda menyesal.

### 5. Minum Air

Minum air minimal 8 gelas dalam sehari. Air merupakan asupan wajib bagi kesehatan dan kelancaran metabolisme tubuh. Tanpa air tubuh akan dehidrasi dan organ di dalamnya tidak dapat bekerja dengan maksimal.

### 6. Kegiatan yang menyenangkan

Lakukan setidaknya satu kegiatan yang biasanya dilakukan anak-anak setiap hari. Seperti melompat-lompat, membuat perahu, hingga bernyanyi di kamar mandi. Lakukan sesuatu yang orang dewasa tidak akan pernah melakukan untuk mengatasi stres dengan cara cerdas.

### 7. Tidur nyenyak

Tidur nyenyak dan berkualitas adalah kunci dalam menjaga kesehatan Anda. Cobalah setidaknya tidur selama 8 jam setiap hari. Tubuh dan pikiran yang beristirahat dengan cukup dapat lebih produktif, dan menghindarkan diri dari pekerjaan yang menumpuk hingga lembur.

# Fokus Beri Perhatian pada Perkotaan



## A. Hermanto Dardak

Ketua Umum PII  
Kepala BPIW periode 2015-2016

Perkotaan menjadi salah satu fokus perhatian Peratuan Insinyur Indonesia (PII). Pasalnya, perkembangan perkotaan kini sangat pesat, sehingga peluang dan tantangan dari perkotaan

memang luar biasa.

“Saat ini sekitar 70 persen kontribusi ekonomi Indonesia berasal dari perkotaan,” ungkap Ketua Umum PII, A. Hermanto Dardak saat ditemui “Sinergi”, beberapa waktu lalu. Menurutnya, kawasan perkotaan menjadi titik konsentrasi aktivitas penduduk, baik ekonomi, sosial dan budaya, termasuk dampak lingkungan dan kemanusiaan.

Tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan, sehingga membuat kawasan perkotaan sangat memerlukan pengembangan mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan dan energi, perumahan layak huni, kesehatan, pekerjaan yang layak, maupun ruang terbuka hijau.

“Dalam pengembangan wilayah memang diperlukan kesamaan persepsi dan bahasa. Hadirnya kamus istilah pengembangan wilayah yang diluncurkan BPIW Kementerian PUPR akan sangat membantu komunikasi para praktisi maupun akademisi dalam mengembangkan infrastruktur yang berbasis kewilayahan,” jelas Kepala BPIW periode 2015-2016. Terlebih, lanjutnya, saat ini kota-kota dunia termasuk di Indonesia dituntut agar memiliki daya saing yang tinggi me-

lalui peningkatan efisiensi, produktivitas, dan nilai tambah yang secara bersamaan memenuhi tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan pengembangan wilayah. “Kota-kota tidak

---

**“Kesamaan bahasa menjadi salah satu modal utama dalam mengkomunikasikan pengembangan perkotaan,” terangnya.**

---

hanya menjalankan fungsi internal, tetapi juga sekaligus memantapkan fungsi eksternalnya dalam hal keterhubungan serta menjadi motor ekonomi bagi kawasan-kawasan di sekitarnya,” lanjut Dardak.

Menurutnya, dalam mewujudkan pembangunan perkotaan memang perlu melibatkan banyak sektoral. “Kesamaan bahasa menjadi salah satu modal utama dalam mengkomunikasikan pengembangan perkotaan,” terangnya.

Pengembangan kota sejatinya sesuatu yang memerlukan proses, sehingga semua pihak harus berlomba-lomba memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan kota, agar kota cepat maju dan berkembang. (ris/infoBPIW)



# BPIW MENJAWAB



**TANYA :**  
Roni, Bekasi :

*Apa sich sebenarnya yang dilakukan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW ?*

**JAWAB :**

1. BPIW membuat perencanaan infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perencanaan infrastruktur yang dibuat berbasis pengembangan wilayah di 35 Wilayah Pengembangan Strateagis (WPS). Infrastruktur yang dibangun merupakan keterpaduan antar unit organisasi atau unor di lingkungan Kementerian PUPR seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan.

Pembangunan infrastruktur yang akan dibangun juga disinkronkan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan. Hal ini terutama program dukungan Kementerian PUPR terhadap pembangunan infrastruktur prioritas nasional seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pengembangan tol, dan pembangunan bandara baru. Produk yang dihasilkan berupa *masterplan* dan *development plan*.

Pembuatan *masterplan* dan *development plan* dilakukan sejak tahun 2015, dimana telah diselesaikan 17 WPS, dan kini juga akan diselesaikan sebanyak 17 WPS. Beberapa WPS yang telah dibuahkan *masterplan* dan *development plan*, seperti WPS 2, yakni Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru.



**TANYA :**  
Esti Astuti, Pondok Kelapa

*Perencanaan infrastruktur PUPR kan dibuat di 35 WPS. Bagaimana yang tidak termasuk di 35 WPS ? Apakah berarti diluar WPS, maka tidak direncanakan BPIW?*

**JAWAB :**

2. Diluar WPS juga menjadi perhatian kita, karena sebagaimana amanah Nawacita untuk membangun dari pinggiran. Apalagi disparitas antar wilayah dan kawasan masih tinggi di kawasan barat dan timur Indonesia. Itu salah satu tantangan pembangunan infrastruktur Indonesia. Tantangan ainnya seperti tingkat urbanisasi tinggi yang mencapai 53%. Diluar WPS kita dapat membangun infrastruktur melalui skema antar WPS atau dalam bentuk dukungan PUPR pada program prioritas nasional, seperti dukungan terhadap 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (NTB). Maupun juga dukungan terhadap pengembangan tol laut, pembangunan bandara baru, dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).



## KUNJUNGI INFO BPIW DI WEBSITE & AKUN KAMI:

 [www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)

 @informasiBPIW

 @informasiBPIW

 Layanan Informasi BPIW

 BPIW/kementerianPUPR



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
KEMENTERIAN PUPR